



PENGANTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL

ASEP SETIAWAN

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta
2018

PENGANTAR
HUBUNGAN INTERNASIONAL



OLEH

ASEP SETIAWAN

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2018

KATA PENGANTAR

Buku Pengantar Hubungan Internasional yang berada di tangan Anda ini berasal dari dua kali masa perkuliahan untuk memperkenalkan Ilmu Hubungan Internasional kepada para mahasiswa semester pertama. Karena sifatnya pengantar, maka bab-bab di dalamnya juga ulasan selintas mengenai pokok-pokok yang menjadi perhatian Ilmu Hubungan Internasional. Dengan pengantar ini diharapkan mahasiswa mendapat gambaran apa yang menjadi skope studi dari Hubungan Internasional.

Beberapa pokok yang menjadi perhatian dari Ilmu Hubungan Internasional tentu terkait dengan aktor-aktor atau para pelaku dalam Hubungan Internasional. Misalnya negara sebagai aktor utama dalam perspektif besar di dalam cabang ilmu ini menjadi perhatian besar agar mahasiswa memahami bahwa negara (nation state) menjadi pilar di dunia internasional. Selain negara aktor non negara juga menjadi pembahasa tersendiri karena ketika lembaga non negara ini belakangan semakin penting perannya. PBB misalnya menjadi aktor non negara sangat signifikan sejak akhir Perang Dunia II tahun 1945 dalam mempertahankan perdamaian dunia.

Demikian juga isu-isu terkait dengan ekonomi politik internasional, keamanan internasional dan bahkan terorisme internasional perlu mendapat perhatian dari para mahasiswa ketika melihat interaksi di dunia. Dengan pengenalan objek studi Hubungan Internasional tidak hanya merangsang mahasiswa untuk ikut memperdalam ilmu ini tetapi juga dapat bermanfaat di kemudian hari dalam karir mereka.

Buku pengantar ini masih pada tahap sangat awal sehingga masih jauh dari sempurna. Saran dan masukan dari para pembaca akan memberikan manfaat

untuk perbaikan ke depannya. Semoga sumbangsih kecil ini memberikan kemanfaatan bagi dunia ilmu sosial pada umumnya.

Jakarta, 1 Oktober 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL	1
BAB II AKTOR NEGARA DAN NON NEGARA	12
BAB III POLITIK INTERNASIONAL	18
BAB IV POLITIK LUAR NEGERI	21
BAB V PERANG DAN DAMAI	30
BAB VI ORGANISASI INTERNASIONAL	34
BAB VII DIPLOMASI.....	46
BAB X STUDI KAWASAN	58
BAB VIII KEAMANAN GLOBAL	78
BAB IX EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL	88
BAB XI GLOBALISASI	92
BAB XII TERORISME INTERNASIONAL	98
BAB XIII TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL	103
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hubungan Internasional di era modern ini dapat diartikan sebagai hubungan antar unit-unit politik yang disebut negara bangsa. Konsep negara bangsa itu sendiri muncul setelah perjanjian Westphalia menggantikan konsep kerajaan dan monarki yang sudah berabad-abad muncul di Eropa. Kemudian negara bangsa ini menyebar dan meluas terutama setelah Perang Dunia II yang menyaksikan kelahiran negara bangsa di berbagai koloni Eropa. Penghapusan penjajahan sejak berakhir Perang Dunia 1945 termasuk lahirnya Indonesia dapat disebut sebagai era penting Hubungan Internasional.

Ilmu Hubungan Internasional pada era awalnya mempelajari hubungan antar bangsa ini karena negara merupakan pelaku utama dalam Hubungan Internasional. Perang besar yang terjadi di dunia setidaknya pada dua kali yakni Perang Dunia I dan II menunjukkan betapa besarnya daya rusak perang antar bangsa ini sehingga melahirkan penderitaan di seluruh muka bumi. Berbeda dengan penjajahan yang berlangsung ratusan tahun, Perang Dunia karena adanya aliansi negara bangsa ini serta perkembangan teknologi militer menyebabkan semakin rumitnya kehidupan antar bangsa. Lahirnya penguasa berambisi untuk

menaklukan dunia seperti Adolf Hitler menyebabkan hubungan internasional menjadi hubungan konflik, perang berkelanjutan tanpa henti.

Basis hubungan internasional antar negara bangsa inilah yang menjadi bagian utama perhatian Hubungan Internasional. Meskipun demikian dengan berkembangnya konsep kehidupan manusia dalam pergaulan internasional dan semakin terbukanya perbatasan antar negara maka para aktor non negara semakin menjadi perhatian dalam hubungan internasional. Yang dimaksud aktor non negara ini seperti Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa yang memainkan peran sebagai penjaga perdamaian dunia. Aktor non negara lainnya seperti perusahaan multi nasional juga memberikan dampak dalam hubungan antar bangsa dimana perusahaan ini berbasiskan manufaktur dan distribusinya di berbagai negara. Indonesia dulu dikenal sebagai basis produksi sepatu Nike. Namun karena perkembangan ekonomi dan tingginya biaya tenaga kerja maka perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat ini memindahkannya ke Vietnam. Sekarang aktor non negara seperti perusahaan teknologi asal Korea Selatan Samsung membangun basis produksinya di berbagai negara.

Aktor non negara yang semakin menjadi perhatian adalah kelompok radikal yang berbasiskan keagamaan. Serangan 11 September 2001 ke Amerika Serikat telah membuka era baru praktek Hubungan Internasional. Jantung ekonomi Amerika Serikat seperti Twin Tower di New York dan jantung keamanan seperti Pentagon diserang oleh kelompok yang menakaman diri Al Qaeda

pimpinan Osama bin Laden. Sebelum peristiwa ini kelompok radikal hanya terbatas bergerak di Timur Tengah. Serangan September telah mengubah cara pandang terhadap aktor non negara dalam hubungan internasional.

Pengertian

Seperti dijelaskan di atas hubungan internasional sebagai praktek koneksi antar bangsa dan antar manusia serta Hubungan Internasional sebagai subyek studi memfokuskan kepada interaksi yang terjadi di muka bumi. Karena basis interaksi ini semakin luas maka terdapat interaksi yang didasarkan pada pola hubungan antar negara serta pola hubungan non negara dan kombinasi diantara keduanya.

Sorensen menjelaskan alasan mengapa perlu mempelajari Hubungan Internasional. “adanya fakta bahwa seluruh penduduk duniaterbagi dalam komunitas politik yang terpisah, atau Negara – Negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama – sama Negara – Negara tersebut membentuk system internasional yang akhirnya menjadi system global” (Jackson dan Sorensen, 2005:2)

Dalam buku berjudul Pengantar Hubungan Internasional, McClelland menjelaskan bahwa “Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat,

negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia” (2005:4).

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan: “Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar”(2005: 3-4). Karena hal-hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa: “Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks.

Mochtar Masoed dalam bukunya Hubungan Internasional menjelaskan apa yang dipelajari dalam Hubungan Internasional

Hubungan Internasional mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara didalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi interaksi dalam Organisasi Internasional dan sebagainya (Mas'ood, 1994:28). G.A. Lopez dan Michael S. Stohl, berpendapat bahwa:

“Hubungan Internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah maupun non-pemerintah” (Lopez & Stohl, 1989:3).

Menurut Holsti, hubungan internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu (Holsti, 1987:29).

Istilah Hubungan Internasional telah berkembang cukup pesat pada akhir abad ke-19, berbagai pakar Hubungan Internasional telah banyak memberikan definisi-definisi secara garis besar bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan yang terjalin antar Negara-negara diseluruh belahan dunia. Dimana didalam Hubungan Internasional sendiri terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi kerja dari Hubungan Internasional sendiri yakni adanya analisis

mengenai perbandingan politik Luar negeri suatu negara, Hukum Internasional, Organisasi-Organisasi Internasional, perbandingan politik dan studi kawasan (*Area studies*), studi-studi strategis (*strategis studies*), pembangunan Internasional, komunikasi Internasional, dan studi perdamaian serta upaya penyelesaian konflik termasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata (Coloumbus dan Wolfe, 1999:21).

Hubungan internasional adalah mencakup hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda dan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok, maupun secara perorangan resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain, yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara.

Hubungan internasional kontemporer bukan hanya mempelajari hubungan politik antar negara-negara tetapi juga dengan sekelompok subjek lainnya yaitu dengan: interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, Organisasi Internasional, lingkungan hidup, gender, keterbelakangan dan seterusnya.

“Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi, diantara masyarakat, Negara-negara, baik yang dilakukan Negara maupun warga Negara yang terjadi dengan melintasi batas-batas geografis Negara” (Holsti,1996:26). Salah satu metode populer yang digunakan untuk menganalisis

kecenderungan Hubungan Internasional kontemporer adalah dengan melihat pola pola hubungan yang mengindikasikan adanya kesinambungan dan perubahan (*Continuity and Change*) dalam semua aspek Hubungan Internasional, seperti yang dinyatakan oleh Toma dan Gorman bahwa: “ Faktor pendukung utama untuk kesinambungan (*Continuity*) Hubungan Internasional adalah aktor negara-bangsa, yang dengan atribut kedaulatan dan penggunaan power untuk meraih kepentingan nasional, berupaya untuk mempertahankan perannya sebagai aktor utama dalam hubungan Internasional. Sedangkan pendukung perubahan (*Change*) adalah globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, ancaman terhadap lingkungan hidup, peningkatan *power* dan *influence* dari actor non-negara” (Toma dan Gorman, 1991:23).

McClelland mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai berikut: “Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antar jenis kesatuan kesatuan sosial tertentu, termasuk keadaan relevan yang mengelilingi interaksi”(McClelland, 1990:27).

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan : Setiap perilaku dipengaruhi oleh interaksi yang dialaminya di masa lalu dan bahwa interaksi adalah sumber daya perilaku. Pengalaman interaksi di masa lalu, sehingga pelaku dapat memperkirakan apa yang akan terjadi dan masing-masing dapat bertindak dengan perkiraan tersebut (McClelland,1990:30).

Menurut Steve Chan dalam bukunya *International Relations in Perspective* “ Hubungan Internasional adalah interaksi aktor-aktor yang tindakan dan kondisinya memiliki konsekuensi penting terhadap aktor lain di luar yurisdiksi efektif unit politiknya” Dari definisi di atas terkaji bahwa negara-bangsa dapat dipandang sebagai pelaku utama dari Hubungan Internasional, hal itu karena yang melakukan tindakan dan dampak dari tindakan itu adalah unit politik walaupun tidak tertutup kemungkinan yang melakukan tindakan itu adalah aktor-aktor non-negara.

BAB II

AKTOR NEGARA DAN NON NEGARA

Pengertian negara bangsa di era modern ini berbeda dengan pengertian entitas politik lainnya seperti kerajaan, kesultanan dan keemiran. Meskipun istilah ini masih berlaku di dunia namun dalam perkembangan hubungan internasional modern, kesatuan politik yang sering banyak disinggung adalah negara bangsa (nation state) atau lebih sederhananya disebut negara atau state.

Apa itu negara ? Negara dapat dipandang dari sudut ilmu hukum atau ilmu politik. Dalam hal ini karena Ilmu Hubungan Internasional dikenal sebagai cabang dari ilmu politik maka sudut pandang ilmu politik lebih banyak digunakan dalam pembahasan mengenai pengertian negara dan konsekuensinya terhadap hubungan antar negara.

Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik menjelaskan berbagai pendapat mengenai negara. Roger H Soltau seperti dikutip Miriam menyatakan negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community).

Miriam Budiardjo dalam bukunya, Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan negara sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Ia juga menyebutkan bahwa negara memiliki tiga sifat yaitu:

1. Sifat memaksa

Negara dengan sah berkuasa untuk menggunakan kekuatan fisik guna mencapai penertiban dalam masyarakat serta mencegah timbulnya anarki.

2. Sifat monopoli

Negara memiliki kemampuan monopoli dalam hal menetapkan tujuan bersama dari masyarakat tersebut. Negara dapat menyatakan suatu hal dilarang berkembang karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan bersama masyarakat.

3. Sifat mencakup semua (all-encompassing, all-embracing)

Semua peraturan perundang-undangan yang ada dalam negara berlaku bagi setiap orang di dalamnya tanpa terkecuali, berkaitan dengan fakta bahwa menjadi seorang warga negara bukanlah kemampuan diri sendiri, tidak seperti organisasi lainnya.

Robert J. Jackson menyebutkan bahwa kata negara merujuk pada unit politik dari keseluruhan teritori, serta sebuah negara memiliki tiga komponen yaitu teritori, populasi, dan pemerintah. Sesuai dengan Konvensi Montevideo tahun 1933, sebuah negara harus memiliki empat aspek yaitu wilayah, penduduk, pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan untuk hubungan internasional.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, negara harus memiliki empat unsur yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Menurut saya, sebuah negara seharusnya memiliki unsur-unsur sesuai dengan Konvensi Montevideo: tanpa wilayah yang jelas tidak akan bisa atau sulit untuk mengatur negara tersebut serta membedakan negara yang satu dengan yang lainnya; tanpa penduduk tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut; tanpa pemerintahan yang berdaulat tentu tidak mungkin penduduk dan unsur-unsur negara lainnya bisa diatur sesuai dengan sekelompok pejabat tersebut, pemerintah yang mampu membuat rakyatnya taat; tanpa kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain (berhubungan dengan dunia internasional) maka negara tersebut tidak mungkin diakui keberadaannya, tanpa pengakuan tersebut negara tidak akan mendapat posisi di lingkup internasional.

Tiap negara tentunya memiliki power dan kemampuannya masing-masing. Masing-masing pemimpin negara menentukan kemampuan apa yang harus dikembangkan dan bagaimana cara menggunakannya agar memaksimalkan pengaruhnya di dunia internasional agar dapat memenuhi kepentingan nasional. Terdapat beberapa sumber power dan kemampuan negara menurut Robert J. Jackson, yaitu:

1. Ekonomi

Semakin kuat ekonomi suatu negara, maka semakin besar kapasitasnya untuk mengembangkan kekuatan militer dan banyaknya sekutu yang bisa dipengaruhi.

2. Geografi dan populasi

Ukuran dan letak suatu negara bisa memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Negara berukuran besar seperti Amerika Serikat dan Rusia memiliki keuntungan terkait dengan jumlah populasi dan sumber daya alamnya, namun di lain sisi juga harus melindungi wilayah yang luas juga perbatasan yang panjang.

3. Sumber daya alam dan kemampuan IPTEK

Suplai energi sangatlah penting bagi tiap negara. Populasi besar dan sumber daya alam yang cukup serta kemampuan IPTEK yang memadai akan memudahkan dalam pengembangan negara tersebut, termasuk dalam bidang militer, persenjataan, bahkan senjata nuklir.

4. Kemampuan militeristik

Ukuran, komposisi, dan perlengkapan angkatan militer merupakan elemen penting dalam menentukan kemampuan suatu negara memproyeksikan power yang dimilikinya.

5. Soft power

Perbuatan, perilaku, atau kontribusi yang dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya tanpa perlu pemaksaan. Kemampuan ini seringkali terdiri dari atraksi budaya dan nilai-nilai serta kebijakan-kebijakan yang dianggap inklusif, menghormati, dan sah, menggunakan kemampuan yang persuasif dan atraktif.

Kata nationalism berasal dari kata dasar nation yang artinya bangsa. Bangsa, berbeda dengan negara, merupakan sebuah entitas budaya, bersifat subjektif. Bangsa berbeda dengan kependudukan suatu negara, namun biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki bahasa yang sama, leluhur yang sama, atau warisan budaya yang sama, walau tidak semua spek tersebut ada. Kebanyakan negara terdiri dari lebih dari hanya satu bangsa, karenanya tentu terdapat lebih banyak jumlah bangsa dibandingkan dengan jumlah negara. John Breuilly mendefinisikan nasionalisme sebagai gagasan dimana anggota negara menyediakan fokus utama dari identitas politik dan loyalitas, yang kemudian menghendaki national self-determination. National-self determination adalah terbentuknya lembaga pemerintah nasional oleh sekelompok orang yang merasa dirinya dari bangsa yang sama. National-self determination ini bertentangan dengan kolonialisme dan imperialisme.

Nasionalisme dan politik global telah mempengaruhi satu sama lain sejak pertengahan abad ke-18. Nasionalisme menyediakan legitimasi baru bagi negara-negara tertentu. Nasionalisme menjadikan dunia seakan terbagi menjadi bangsa-

bangsa, serta menempatkan bangsa sebagai sumber otoritas dalam keistimewaan dan agama. Nasionalisme berhasil mencapai hal yang tidak bisa dicapai liberalisme dan sosialisme yaitu membentuk solidaritas emosional pada masyarakat skala luas yang terdiri dari orang-orang berbeda yang awalnya tidak mengenal satu sama lain.

BAB III

POLITIK INTERNASIONAL

Didalam Hubungan Internasional salah satu yang menjadi pokok kajian (core subject) adalah Politik Internasional, dimana memperjuangkan segala bentuk kepentingan dan kekuasaan. Pada hubungan Internasional orang hanya menyaksikan adanya berbagai macam bentuk interaksi antarnegara dalam masyarakat internasional, sedangkan dalam politik internasional bertalian dengan masalah interaksi karena adanya tindakan suatu negara serta reaksi atau respon dari negara lain.

Politik internasional dan hubungan internasional secara istilah dan pengertian itu sama, tetapi secara teoritis terdapat perbedaan. Politik internasional membahas tentang keadaan soal-soal politik ini di masyarakat internasional dalam arti yang sempit yaitu dengan berpokok atau bertitik tolak pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional adalah suatu istilah yang mencakup totalitas hubungan-hubungan dikalangan bangsa-bangsa dan kelompok dalam masyarakat dunia (Wiraatmadja, 1970:33).

Menurut K.J. Holsti dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional karya Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

"Politik internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi" (Perwita & Yani, 2005: 40).

Politik internasional merupakan suatu tindakan negara atau beberapa negara yang ditujukan pada suatu negara atau negara-negara lainnya dan sifatnya lebih ditekankan pada soal-soal politik masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara-negara tersebut.

Berdasarkan ruang lingkupnya, antara hubungan internasional dengan politik internasional terdapat perbedaan ruang lingkup, adapun ruang lingkup dari Politik Internasional adalah: "Ruang Lingkup Politik Internasional terbatas hanya pada "permainan kekuasaan" yang melibatkan negara-negara berdaulat, sehingga pelakunya hanyalah negara"(Perwita dan Yani 2005 : 39).

Politik Internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi, dan interplay antar aktor dalam lingkungannya. Adapun faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yaitu:

- Lingkungan Fisik seperti lokasi geografis, sumber daya alam, dan teknologi suatu bangsa.

- Penyebaran sosial dan perilaku, yang didalamnya mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu.

- Timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-Organisasi Internasional dan perantara-perantara ekonomi serta politik lainnya.

BAB IV

POLITIK LUAR NEGERI

Ada beberapa definisi tentang kebijakan luar negeri dengan tekanan yang berbeda-beda. Berikut ini akan diberikan definisi yang sering digunakan oleh akademisi maupun praktisi.

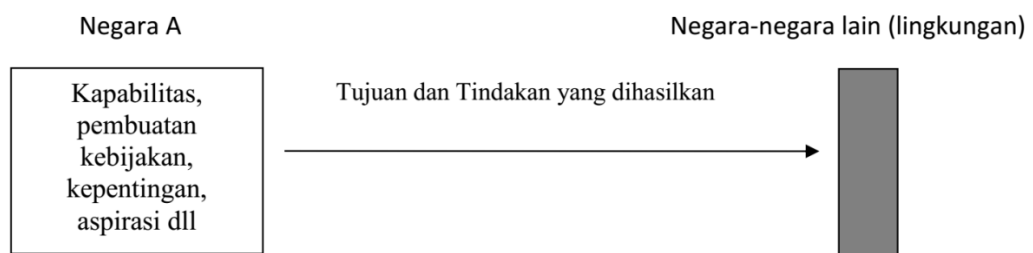
Menurut Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai *explicit and of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries*.⁷¹ Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melawati batas kewilayahan negara. Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri.

Definisi yang diberikan Kegley dan Wittkopf menekankan kebijakan luar negeri sebagai *decisions governing authorities make to realize international goals*. Dalam hal ini kebijakan luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.

K.J Holsti kemudian menggambarkan studi politik luar negeri itu dalam bentuk gambar berikut¹.

Gambar 1 Politik Luar Negeri



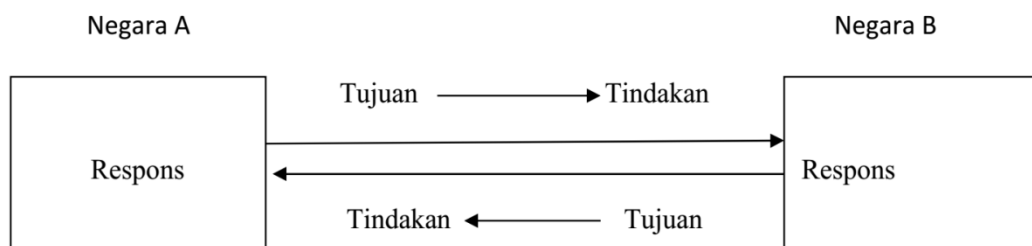
Sumber: Holsti (1992)

Dari gambaran itu jelas bahwa ketika sebuah negara A melakukan tindakan kepada lingkungan internasional termasuk di dalamnya negara dan sekumpulan negara serta unsur lainnya, maka itulah yang disebut dengan politik luar negeri. Sedangkan jika studi itu fokus kepada interaksi negara

¹ K.J. Holsti. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.

serta unit social, politik dan bisnis maka itu disebut sebagai politik internasional seperti dalam gambaran KJ Holsti berikut.

Gambar 2 Politik Internasional



Sumber: Holsti (1992)

Gambaran klasik mengenai bidang studi politik luar negeri yang dibedakan dengan politik internasional karena hubungan internasional pada umumnya membahas interaksi politik, maka jelas bahwa studi politik luar negeri bagaikan studi aksi, studi kebijakan dan bagaimana proses pengambilan keputusan sebuah negara serta bagaimana instrument yang digunakan dalam menjalankan kebijakan itu dan bagaimana pula respons terhadap kebijakan negara lain atau lingkungan.

Fungsi Kebijakan Luar Negeri

Secara analitis, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara, dan fungsi yang paling umum adalah:

1. Melindungi keamanan nasional, misalnya, dengan mengembangkan kekuatan militer dan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain;

2. Menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan, misalnya, dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan investasi asing;

3. Membina pembangunan daerah strategis penting dan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral, dan

4. Mendukung martabat manusia melalui, misalnya, bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategi.

Mengidentifikasi fungsi-fungsi politik luar negeri tidak berarti bahwa negara gagal untuk mencapai tujuan lain (misalnya, menyebarkan ideologi politik atau agama), atau bahwa setiap negara bergerak di bidang kebijakan luar negeri di bawah setiap fungsi, atau bahwa setiap negara diberikan mengejar fungsi-fungsi ini koheren atau efektif. Menggambarkan fungsi dasar membantu, namun, untuk analisis pusat pada apa negara berusaha untuk mencapai melalui kebijakan luar negeri mereka. Umumnya, negara apa yang di slot kebijakan luar negeri mereka ke dalam salah satu fungsi tersebut. Secara tradisional, fungsi-fungsi kebijakan luar negeri telah ada dalam hirarki, dengan keamanan nasional dan kekuatan ekonomi dan kesejahteraan menerima bagian terbesar dari perhatian. Selama Perang

Dingin, keamanan nasional dan kekuatan ekonomi yang erat terhubung, terutama untuk kekuatan besar, yang menerangi mengapa para pembuat kebijakan luar negeri dilihat hampir segala sesuatu melalui lensa keamanan dan kekuasaan materi.

Oleh karena itu, penyediaan bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan dukungan untuk hak asasi manusia sebagian besar terperangkap dalam persaingan geopolitik untuk keamanan dan kekuasaan dipupuk oleh sistem internasional bipolar. Dalam lingkungan ini, masalah kesehatan pada dasarnya tidak berpengaruh independen pada pembuatan kebijakan luar negeri.

Tujuan Kebijakan Luar Negeri

Istilah kepentingan nasional kadang-kadang disalahgunakan sebagai alat untuk menganalisis tujuan bangsa. Kenyataannya terjadi perebatan ilmiah yang berkepanjangan mengenai arti konsep ini, namun hanya sedikit kesepakatan yang dicapai.¹⁰⁶ Kelemahan utamanya adalah kekaburan konsep tersebut. Seperti yang dituliskan oleh Paul Seabury.

Ide kepentingan nasional mungkin mengacu pada serangkaian tujuan ideal yang seharusnya diusahakan untuk diwujudkan dalam tindak hubungan luar negerinya. Dengan istilah yang lebih baik, kita mungkin dapat menyebutkannya konsep kepentingan nasional yang bersifat normatif dan kewarganegaraan... Arti kedua yang sama pentingnya mungkin dapat disebut

kepentingan yang bersifat deskriptif. Dalam arti kepentingan nasional mungkin dapat dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui kepemimpinannya dengan perjuangan yang gigih. Bila kita bicara tentang kepentingan nasional dalam arti deskriptif ini, kita keluar dari bidang metafisika ke alam kenyataan... Dapat juga dikatakan bahwa kepentingan nasional adalah apa yang dikatakan pembuat kebijakan luar negeri sebagai kepentingan nasional. Definisi ketiga dapat membuat arti kepentingan nasional agak lebih jelas. Kepentingan nasional Amerika sering menjadi arena konflik antarindividu dan kelompok masing-masing yang mempunyai konsepsi yang sangat berbeda. Ketidaksepakatan mengenai kebijakan dan tindakan mungkin timbul diantara mereka yang pada dasarnya setuju akan tujuan umum negara mereka di dunia. Namun ketidaksepakatan kebijakan biasanya disebabkan perbedaan pendapat diantara pembuat kebijakan mengenai konsepsi tentang apakah Amerika Serikat dan apa peranannya dalam politik dunia, bahkan bagaimana seharusnya misi yang diembannya. Walaupun mungkin terdapat kepentingan nasional yang bersifat tetap seperti pemeliharaan diri yang disepakati setiap orang namun tidak seorangpun dapat mengkalim dengan pasti bahwa setiap tujuan kusus dan tujuan lainnya merupakan serangkaian kepentingan nasional.

Dalam hal ini untuk menghindari istilah tersebut maka digunakan konsep tujuan yang sebenarnya adalah gambaran atau keadaan peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi yang dikemudian hari yang

ingin diwujudkan pemerintah melalui pembuat kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh di luar negeri dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain.

1. Tujuan kepentingan dan nilai inti

Kepentingan dan nilai inti dapat digambarkan sebagai sejenis kepentingan yang untuk mencapainya kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan ini biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa sikap kritis. Kepentingan dan nilai inti seringkali dihubungkan dengan pemeliharaan diri suatu unit politik. Kepentingan dan nilai inti merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan lain jelas tidak dapat dicapai apabila unit politik yang menegukannya tidak mempertahankan eksistensinya sendiri. Definisi yang tepat dari nilai atau kepentingan inti di negara tertentu tergantung pada sikap mereka yang membuat kebijakan.

2. Tujuan Jangka Menengah

Terdapat beberapa tujuan jangka menengah yaitu: Mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi adalah tujuan utama semua pemerintah pada zaman ini tidak dapat dicapai dengan kekuatan sendiri. Karena terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh satu negara misalnya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia,

teknologi maka perlu adanya interaksi dengan negara lain. Hal ini dapat dilakukan melalui perdagangan, bantuan luar negeri, akses informasi yang dapat juga meningkatkan kesejahteraan.

Jenis yang kedua dari tujuan jangka menengah adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem itu. Pada saat ini, prestise dapat diukur melalui tingkat perkembangan industry dan keterampilan ilmiah serta teknologi. Tujuan jangka menengah ini tidak mempunyai unsure waktu khusus, tetapi sebagian pemimpin masa kini dan negara berkembang berharap dapat mulai mengejar negara-negara yang ekonominya lebih maju. Negara industry dan negara maju dapat meningkatkan gengsi internasionalnya melalui sejumlah kebijakan dan tindakan, termasuk ekspansi kemampuan militer, pembagian bantuan luar negeri, jalur diplomatik serta kunjungan balasan oleh kepala negara serta pameran industri.

Tujuan jangka menengah yang ketiga mencakup banayak bentuk perluasan diri atau imperialism. Beberapa negara mengklaim wilayah tatangga sekalipun wilayah itu tidak memenuhi persyaratan militer atau kesatuan etnis yang penting. Perluasan wilayah menjadi tujuan dalam dirinya sendiri terlepas apakah ia memenuhi atau tidak memenuhi kebutuha strategis, ekonmis atau sosial.

2. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian, pandangan, mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang

mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya. Perbedaan antara tujuan jangka menengah dan jangka panjang tidak hanya berhubungan dengan unsur waktu yang berlainan yang inheren di dalamnya., juga terdapat perbedaan panjang, negara biasanya melancarkan tuntutan universal karena tujuannya tidak kurang dari membangun kembali sistem internasional menyeluruh menurut rencana atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan.

BAB V

PERANG DAN DAMAI

Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Meskipun, sebagaimana yang dinyatakan Shelling konflik, kompetisi, dan kerjasama (*cooperation*) pada dasarnya saling berkaitan, konflik terjadi manakala tujuan, kebutuhan dan nilai-nilai kelompok-kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan. Sedangkan definisi konflik itu sendiri adalah:

Konflik yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang direncanakan dengan baik, timbul dari perpaduan berbagai sebab, seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap yang bermusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatik tertentu. Konflik tersebut umumnya disebabkan pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau mempertahankan wilayah teritorial, keamanan, semangat jalur kemudahan daerah pemasaran, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintah negara yang tidak bersahabat, mengubah prosedur dalam Organisasi PBB, dan lain-lain. Dalam usaha mempertahankan atau mencapai tujuan, tuntutan, tindakan atau keduanya akan berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan negara lainnya” (Holsti, 1991:53).

Sedangkan menurut A.D Nasution memberikan pengertian konflik sebagai berikut:

Konflik merupakan persaingan, apakah ligas, semu, atau masih berupa sesuatu yang bersifat potensial, adalah suatu hal yang normal dalam hubungan antar

negara kebangsaan. Sumber konflik terletak didalam hubungan antar sistem negara-negara kebangsaan itu sendiri, yang dilandasi oleh konsep egosentrisme yaitu aspirasi untuk mempertahankan dan meningkatkankekuatan serta keduddukan negara dalam hubungannya dengan negara lain. (Nasution, 1991:53).

Dari hasil konflik ini kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan agar tercapinya kesepakatan yang disetujui oleh kedua negara mengenai konflik sengketa di Ambalat, yang salah satunya melalui kebijakan militer, karena menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan wilayah yang mengarah pada situasi konflik eksternal antar kedua negara, walaupun tidak sampai terjadi peperangan.

Ted Robert Gurr mengemukakan bahwa biasanya konflik dengan menggunakan kekerasan terjadi dalam suatu masyarakat karena adanya rasa kekecewaan yang timbul berkaitan dengan adanya harapan-harapan yang tidak terpenuhi dan terakomodasi dalam suatu sistim politik suatu masyarakat atau bangsa. Kekecewaan menimbulkan persaan tertindas oleh kelompok lainnya atau oleh pemerintah, maka berlangsunglah konflik dengan menggunakan kekerasan (Colemen dalam Kweit, 1996:153-254).

Colemen tujuh tahapan dalam perkembangan konflik, yaitu:

1. Permulaan / awal munculnya permasalahan
2. Diskulibrium hubungan komunitas
3. Perasaan tertindas mucul kepermukaan
4. Pertentangan pendapat yang makin mendorong keyakinan untuk menentang atau melakukan perlawanan

5. Kecenderungan bersikap atau berkeyakinan untuk mencurigai dan menganggap apapun yang dilakukan pihak yang beranggapan sebagai lawan adalah salah dan buruk
6. Penentangan dan yang ditentang saling bermusuhan
7. Persengketaan memuncak dengan terlepas dari harapan, tuntutan atau perbedaan pendapat semula. (Coleman dalam Kweit, 1996:154).

Cara penyelesaian konflik berarti setiap bentuk akhir setelah usai konflik tanpa mempermasalahkan bagaimana bentuk akhir tersebut diperoleh, hal ini berarti bahwa akibat dari konflik juga merupakan cara penyelesaian konflik. Holsti menyatakan cara penyelesaian konflik dalam enam bagian yang sama dengan akibat dari konflik, yaitu:

1. Melakukan penarikan tuntutan

Salah satu atau kedua belah pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan fisik atau mendesak perundingan memenuhi tuntutan atau menghentikan tindakan yang pada dasarnya akan menyebabkan tindakan balasan yang bermusuhan.

2. Penaklukan

Mencakup persetujuan dan perundingan diantara negara-negara yang bermusuhan. Salah satu pihak telah dapat mencapai sasaran dengan menekan pihak lain untuk menyadari bahwa keberhasilan pencapaian sasaran dan bertahan bagi pihak tersebut sama sekali sudah tidak ada.

3. Membentuk *Difference*

Tidak adanya implementasi, ancaman untuk memakai kekerasan. Meskipun tidak terjadi kekerasan, namun sikap tunduk merupakan akibat dan ancaman militer sehingga bentuk penyelesaian konflik dengan cara tidak damai.

4. Kompromi

Kompromi adalah penyelesaian konflik yang menuntut pengorbanan dari posisi yang telah diraih oleh pihak yang bersengketa.

5. Penyelesaian Melalui Pihak Ketiga

Mencakup penyerahan persetujuan dan itikad untuk menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai kriteria keadilan.

6. Penyelesaian secara damai

Penyelesaian melalui cara-cara damai (perundingan, konsiliasi, dan sebagainya) sehingga masing – masing pihak yang bersengketa secara perlahan dapat menerima keadaan posisi yang baru. (Holsti dalam Rudy, 2002:99).

Resolusi konflik menjadi sebuah kerangka kerja dalam penyelesaian konflik, menurut Peter Wallensten ada tiga unsur penting dalam definisi resolusi konflik yaitu:

1. Adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen rahasia yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak.
2. Setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek.
3. Pihak- pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan, proses rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang ditambahkan.

BAB VI

ORGANISASI INTERNASIONAL

Salah satu aktor modern dalam hubungan internasional adalah Organisasi Internasional baik yang berbasis pemerintah (government) maupun lembaga swadaya masyarakat (non governmental organisation). Sebagian besar studi hubungan internasional berfokus pada organisasi yang berbasis pemerintah. Hal itu antara lain disebabkan adanya pandangan yang menitikberatkan pada negara sebagai aktor penting dalam hubungan internasional.

Pandangan yang menekankan pada negara ini memang beralasan karena sebagian besar Organisasi Internasional yang berperan penting mensyaratkan keanggotaannya dalam bentuk negara. Lihat saja bagaimana PBB yang lahir pasca Perang Dunia II mayoritas anggotanya adalah negara, bukan perseorangan atau LSM. Demikian pula yang terlihat dalam ASEAN yang lahir sejak 1967.

Latar belakang

Menurut Suwardi Wiriaatmadja, kepustakaan Organisasi Internasional mulai tumbuh dalam abad ke-17 yang mendapat inspirasi dari apa yang disebut

Grand Design Henry IV.² Pokok-pokok pikirannya terbaca dalam memOrganisasi Internasionalr Sully, salah seorang menterinya, yang kemudian dikembangkan dalam pamphlet yang ditulis Emeric Cruce. Karya Cruce ini diterbitkan tahun 1623 yang menjelaskan pengembangan Organisasi Internasional secara luas.

Negara-negara besar yang bertindak sebagai quasi pemerintahan di Eropa dalam masa setelah jatuhnya Napoleon, konferensi internasional yang sering diadakan pada abad ke-19, aribtrasi dan konsiliasi diantara sejumlah negara, dibentuknya uni internasional yang bersifat publik pada akhir abad ke-19 dan adanya beberapa federasi merupakan pendorong lahirnya studi tentang Organisasi Internasional.

Konferensi perdamaian di Den Haag pada tahun 1899 dan 1907 yang diselenggarakan atas prakarsa Czar Nicholas II mendorong banyak analis mencurahkan perhatian pada soal-soal yang berkaitan dengan Organisasi Internasional.

Setelah Perang Dunia I, Organisasi Internasional telah menjadi suatu disiplin yang diakui. Kecenderungan studi yang terlihat waktu itu adalah :

1. Menghubungkan lembaga-lembaga Organisasi Internasional dengan politik internasional dan hukum internasional.
2. Mempergunakan cara analogi dalam menghubungkan Organisasi Internasional dengan pemerintahan nasional dan federal.

² Suwardi Wiriaatmadja, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: Alumni, 1970, Hal 27-28

Kecenderungan kedua bertambah kuat setelah Perang Dunia II. Hal itu terlihat dari para penulis dan organisasi yang mencita-citakan adanya pemerintahan dunia (world government) yang lebih intensif dari PBB.

Sedangkan Jacobson melukiskan lebih jauh lagi sejarah adanya Organisasi Internasional jauh sebelum abad ke-17.³ Prototipe Organisasi Internasional modern, tulis Jacobson, dapat dilihat dengan adanya Liga Delian dan Liga Hanseatic.

Liga Delian merupakan perhimpunan negara-negara kota Yunani dimana Athena memainkan peran utama dan diciptakan terutama untuk mendukung operasi militer melawan musuh bersama. Liga Delian memiliki umur cukup panjang. Liga ini didirikan pada tahun 478 SM dan masih eksis sampai 338 SM. Liga Delian menjadi seperti instrumen dominasi Athena daripada mekanisme kolaborasi diantara sekutunya.

Liga Hanseatic merupakan asosiasi kota-kota Jerman Utara yang hidup pada akhir abad ke-11 sampai abad ke-17. Pendorong lahirnya liga ini adalah ekonomi sedangkan fungsi utamanya terkait dengan perdagangan.. Wibawa liga ini menurun sejalan dengan meningkatnya pengaruh rute-rute perdagangan baru dan setelah terbukti tidak efektif melawan kompetisi Inggris dan Perancis.

³ HR Jacobson, "The Nature of International Organisations" dalam Marc Williams, *International Relations in the Twentieth Century: A Reader*. London, Macmillan Education, 1989, hal, 207.

Pengertian

Menurut HK Jacobson Organisasi Internasional adalah *struktur kelembagaan yang diciptakan diantara dua atau lebih negara berdaulat untuk melakukan interaksi politik secara reguler*. ORGANISASI INTERNASIONAL dibedakan sebagai fasilitas diplomasi tradisional oleh struktur dan keberadaannya. ORGANISASI INTERNASIONAL mengadakan pertemuan para wakil negara anggotanya pada interval waktu secara berkala, memiliki prosedur spesifik untuk membuat keputusan dan staf permanen sekretariat atau markas besarnya.

Dalam tingkat tertentu ORGANISASI INTERNASIONAL mewakili pemerintah namun mereka bukan pemerintahan meski memiliki kapasitas melaksanakan kebijakan kepada para anggotanya yang tidak lain adalah negara. Dalam hal ini ORGANISASI INTERNASIONAL dapat dipandang sebagai jaringan permanen yang menghubungkan negara.

Sejumlah Organisasi Internasional dapat menjadi pemerintahan namun sementara ini dianggap sebagai perhimpunan negara yang sukarela yang tergantung tindakan secara sukarela pula dalam melaksanakan keputusan ORGANISASI INTERNASIONAL.

Pendapat lain tentang ORGANISASI INTERNASIONAL ini juga hampir sama yakni organisasi yang diciptakan dua atau lebih negara berdaulat, bertemu secara berkala dan memiliki staf tetap. Dalam ORGANISASI INTERNASIONAL ini setiap negara mengemukakan kepentingan dan kebijakannya yang dijelaskan oleh wakil

dari negara anggota. Keanggotaannya bersifat sukarela oleh karena itu dalam bahasa teoritis, ORGANISASI INTERNASIONAL tidak menyaingi kedaulatan negara. Namun demikian pada kenyataannya, ORGANISASI INTERNASIONAL itu menyaingi kedaulatan negara.

ORGANISASI INTERNASIONAL dapat dikategorikan menurut keanggotaannya dan skope tujuannya. Keanggotaannya dapat bersifat global, regional atau sifat lain. Liga Bangsa Bangsa dan PBB dapat digolongkan ORGANISASI INTERNASIONAL bersifat global. Sementara itu ada pula ORGANISASI INTERNASIONAL yang bersifat regional seperti ASEAN, Organisasi negara-negara Amerika (OAS=Organization of American States) dan OAU (Organization of African Unity).

Disamping itu ada pula sifat ORGANISASI INTERNASIONAL lain seperti Persemakmuran Inggris (British Commonwealth) yang dibatasi keanggotaannya negara bekas jajahan Inggris.

Tujuan ORGANISASI INTERNASIONAL dapat dikategorikan dalam tujuan yang luas dan tujuan yang terbatas. ORGANISASI INTERNASIONAL yang bertujuan luas melaksanakan berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi, militer, kebudayaan, sosial, teknik, hukum dan pembangunan. ORGANISASI INTERNASIONAL yang bertujuan luas diantaranya adalah PBB.

Namun ada pula ORGANISASI INTERNASIONAL yang dibentuk dengan tujuan terbatas yang biasa disebut sebagai organisasi fungsional. WHO misalnya

adalah organisasi fungsional yang bersifat internasional yang menangani masalah-masalah kesehatan. Secara lebih sederhana penggolongan ORGANISASI INTERNASIONAL itu dapat dilukiskan sebagai berikut :

Tujuan	<i>Tujuan Luas</i>	Tujuan Terbatas
<i>Keanggotaan</i>		
Global	PBB	WHO
Regional	ASEAN, NATO, OAU	COMECON, Control Organization of East Africa
Yang Lain	British Commonwealth	International Wool Study Group

ORGANISASI INTERNASIONAL melaksanakan serangkaian fungsi yang dapat disebutkan sbb:

1. Forum komunikasi : ORGANISASI INTERNASIONAL merupakan tempat yang tepat untuk bagi para wakil negara untuk bertemu secara berkala dan membahas berbagai isu yang tak bisa dibahas di tempat lain. Misalnya, AS membahas masalah Palestina meski tidak mengakui Organisasi Pembebasan Palestina. ORGANISASI INTERNASIONAL juga berperan sebagai arena resmi untuk berkomunikasi antar negara dan bahkan mampu menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan.

2. Regulator : ORGANISASI INTERNASIONAL melayani sejumlah kapasitas sebagai pengatur soal-soal mulai dari kesehatan, pos, meteorologi sampai energi atom. WHO misalnya, menyusun pengaturan kesehatan internasional “untuk menjamin keamanan maksimum melawan penyebaran penyakit dengan campur tangan minimum lalu lintas dunia”. Dewan Energi Atom Internasional menyusun pengaturan transfer dan penggunaan teknologi nuklir.

3. Fungsi distributif. Bank Dunia dan IMF, misalnya, mendistribusikan dana ke sejumlah negara yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan . Sama halnya yang dilakukan UNICEF (United Nations Children’s Fund) yang mendistribusikan berbagai keperluan dan jasa bagi anak-anak di seluruh dunia.

4. Meningkatkan kemampuan militer. Adanya NATO dan Pakta Warsawa menunjukkan bahwa Organisasi Internasional juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kemampuan militer anggotanya.

5. Pemelihara perdamaian. PBB berkali-kali mengirim pasukan pemelihara perdamaian ke berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Sebagian ada yang berhasil tetapi ada pula yang gagal seperti terjadi di Somalia.

6. Fungsi politik supranasional. ORGANISASI INTERNASIONAL juga memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan yang mengikat negara anggota bila tidak ada keputusan bulat. Dewan Keamanan PBB misalnya mengeluarkan keputusan yang dapat mengikat negara anggota PBB meski tidak disetujui semua negara.

Organisasi Internasional memainkan peran penting dalam hubungan internasional. ORGANISASI INTERNASIONAL terbagi kedalam organisasi yang berbasiskan negara dan yang berbasiskan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah. ORGANISASI INTERNASIONAL beranggotakan negara masih menjadi ajang diplomasi negara-negara di dunia ini. Meskipun demikian ORGANISASI INTERNASIONAL beranggotakan LSM mulai menjadi penting terutama dalam era globalisasi sekarang.

PBB: Sejarah dan Struktur Organisasinya

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dapat dikatakan sebagai Organisasi Internasional yang terbesar dan terpenting pasca Perang Dunia II yang berakhir tahun 1945. Lahirnya badan dunia yang beranggotakan seluruh negara di muka bumi ini merupakan upaya para pemimpin dunia terutama para pemimpin Sekutu

yang memenangkan PD II melawan kekuatan Poros (Jerman-Jepang) untuk memelihara perdamaian.

Artikel ini akan mengulas tentang dua pengaruh peristiwa yang mendorong lahirnya PBB sehingga melahirkan kerja sama dan bentuknya seperti sekarang ini sudah berusia lebih dari setengah abad. Bagian kedua akan memaparkan struktur organisasi PBB secara sederhana.

Sedikitnya ada dua peristiwa penting yang ikut mendorong lahirnya badan PBB.⁴

1. Pengalaman Liga Bangsa Bangsa (LBB)

LBB yang terbentuk sesudah Perang Dunia I gagal memelihara perdamaian karena tiadanya faktor pemaksa badan dunia ini. Namun demikian LBB tetap dipandang sebagai lembaga internasional yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip yang baik. Tahun 1938, Churchill dari Inggris melukiskan LBB sebagai “jalan yang paling bijaksana, paling suci, paling masuk akal dan paling praktis” menuju pencegahan perang.

2. Kerja Sama sekutu

Peperangan telah melahirkan harapan akan kerja sama pasca peperangan. Piagam Atlantik tahun 1941 menyebutkan perlunya sebuah organisasi. Pada tahun

⁴ Stuart T Miller, *Mastering Modern European History*. London: MacMillan, 1988, hal.472-474.

1942, 26 negara mendukung Piagam tersebut. Sebuah rencana disusun di Dumbarton Oaks, Washington tahun 1944. Kemudian pada bulan April-Juni 1945, konferensi umum PBB di San Francisco dengan 51 anggota menyetujui Piagam PBB yang terpisah dari penyelesaian pasca PD II. Markas utama PBB lalu ditetapkan di New York.

Struktur PBB

1. Majelis Umum (MU)

MU merupakan lembaga konsultatif yang bertemu setiap setahun sekali. MU memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota-anggota lembaga internasional lainnya di bawah payung PBB. MU juga memutuskan penerimaan anggota baru. Semula keanggotaan dibatasi pada negara-negara yang mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Namun kemudian negara lainnya juga bisa menjadi anggota.

2. Dewan Keamanan (DK)

DK PBB berfungsi secara terus menerus. Pada awalnya memiliki sebelas anggota. Lima anggota tetap yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, RRC dan Uni Soviet. Sedangkan enam lainnya adalah anggota tidak tetap yang dipilih Majelis

Umum. Lima anggota tetap memiliki hak veto dalam masalah apapun. Hak veto adalah hak istimewa anggota tetap yang digunakan untuk menolak sebuah keputusan. Jika satu anggota tetap mengajukan hak veto maka keputusan itu tidak bisa dilaksanakan. Ketika Uni Soviet bubar pada Desember 1991, maka posisinya digantikan Rusia. Kini anggota tetap DK PBB menjadi 10 negara.

3. Organisasi Spesialis atau Lembaga-lembaga Khusus

PBB dilayani oleh birokrasi tersendiri berupa Sekretariat yang merupakan organisasi multinasional yang memberikan pelayanan kepada badan dunia itu beserta lembaga-lembaga di bawahnya. Mereka itu antara lain:

- a. Pengadilan Internasional yang menangani pertikaian perjanjian dan aspek hukum internasional
- b. Dewan Perwalian yang bertanggung jawab atas teritorial yang dimandatkan kepadanya
- c. Dewan Ekonomi dan Sosial yang dibentuk untuk memajukan kerja sama internasional dalam berbagai aspek. Dewan ini kemudian terdiri dari berbagai lembaga seperti organisasi yang menangani soal keuangan, kesehatan, buruh, pertanian dan pangan serta pengungsi.

EVALUASI PBB

Sebagian dari kelemahan yang terdapat dalam LBB masih melekat pada LBB.

1. Tiadanya sanksi independen. Churcill pernah meminta agar lembaga dunia itu dipersenjatai. Namun pada kenyataannya PBB tergantung pada sumbangan kontingen pasukan dari anggotanya dan memberlakukan sanksi ekonomi terbatas seperti LBB.

2. Hak Veto. Veto diperuntukkan bagi proteksi kedaulatan negara. Namun pada kenyataannya digunakan untuk berbagai alasan baik oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Tahun 1950, ketentuan mengenai veto ini diamandemen yakni bisa diabaikan oleh suara dua pertiga anggota Majelis Umum jika melibatkan agresi.

3. Keanggotaan yang luas. Penerimaan anggota baru menjadi masalah persaingan antara AS dan Uni Soviet. Selain itu proses dekolonisasi melahirkan jumlah yang berlipat ganda dari asalnya yang hanya 50 negara pada tahun 1961. Muncul masalah dimana banyak anggota baru melihat bahwa PBB sebagai forum rivalitas antara dua negara adidaya.

Sejauh ini, meski terdapat banyak kelemahan terutama di pandangan negara berkembang, PBB masih dianggap lembaga dunia yang memiliki atribut untuk memelihara perdamaian dunia. Pada setengah abad terakhir, antara lain berkat partisipasi PBB, Perang Dunia III dapat dicegah. Perang terbatas memang terjadi namun tidak sampai meluas pada skala dunia.

Organisasi yang memfokuskan diri pada bidang ekonomi dan sosial, bagi negara-negara yang sedang berkembang, sangat penting dibandingkan soal-soal

politik dan keamanan. Banyak program PBB dalam bidang lingkungan dan kependudukan serta kesehatan dapat memberikan sumbangsih berarti bagi perdamaian dan keamanan dunia.

BAB VII

DIPLOMASI

Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus.

Diplomasi yang paling sederhana dan tertua adalah diplomasi bilateral antara dua pihak dan biasanya merupakan misi dari kedutaan besar dan kunjungan kenegaraan. Contohnya adalah Persetujuan Perdagangan Bebas Kanada-Amerika antara Amerika Serikat dan Kanada. Jenis lainnya adalah diplomasi multilateral yang melibatkan banyak pihak dan bisa ditelusuri dari

Kongres Wina. PBB adalah salah satu institusi diplomasi multilateral. Beberapa diplomasi multilateral berlangsung antara negara-negara yang berdekatan atau dalam satu region dan diplomasi ini dikenal sebagai diplomasi regional.

Diplomasi telah menjadi salah satu bagian yang vital dalam kehidupan negara dan merupakan sarana utama guna menangani masalah-masalah internasional agar dapat dicapai suatu perdamaian dunia. Dengan sarana diplomasi itu pemerintah menjalankannya dalam rangka mencapai tujuannya dan mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip yang dianutnya. Diplomasi yang merupakan proses politik itu terutama dimaksudkan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lainnya. Sebagai sebuah proses politik, diplomasi juga merupakan bagian dari usaha saling mempengaruhi yang sifatnya sangat luas dan berbelit-belit dalam kegiatan internasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun Organisasi Internasional untuk meningkatkan sasarannya melalui saluran diplomatik.

Secara etimologis, kata “diplomasi” berasal dari kata Yunani “diploun” berarti melipat. Hal ini merujuk kepada fenomena yang ada pada masa Kekaisaran Romawi dimana semua paspor yang melewati jalan negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat dan dijahit jadi satu. Surat jalan logam ini disebut “diplomas”.

Pada zaman Pertengahan, semua surat resmi negara yang dikumpulkan, disimpan di arsip, yang berhubungan dengan hubungan internasional dikenal dengan nama “diplomaticus” atau “diplomatique”. Siapapun yang berhubungan dengan surat-surat tersebut dikatakan sebagai milik “res diplomatique” atau “bisnis diplomatik”. Dari masa ke masa kata “diplomasi” dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional dan siapapun yang ikut mengaturnya dianggap sebagai “diplomat”.

Menurut Ernest Satow : kata diplomasi pertama kali dipakai Burke untuk menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dan perundingan di tahun 1796. Burke juga menggunakan istilah pertama kali “lembaga diplomatik” pada tahun yang sama. Istilah “jasa diplomatik” dalam arti cabang pelayanan negara yang menyediakan personil-personil misi tetap di luar negeri dijumpai dalam “Annual Registrar tahun 1787”.

Definisi Diplomasi.

Istilah diplomasi seringkali digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, namun diplomasi memiliki banyak arti. Berikut ini adalah beberapa definisi diplomasi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya :

Menurut “Random House Dictionary” diplomasi diartikan sebagai “Tindakan pejabat pemerintah untuk mengadakan perundingan-perundingan dan hubungan lainnya antara negara-negara; seni atau pengetahuan untuk melakukan perundingan-perundingan tersebut ; kepandaian untuk mengatur atau melakukan

perundingan, menghadapi orang-orang, dengan demikian ada sedikit atau tidak adanya kebijakan yang bersifat dendam”

Dalam Bahasa Inggris di·plo·ma·cy yang dibaca də'plōmāsē/ merupakan kata benda yang artinya : the profession, activity, or skill of managing international relations, typically by a country's representatives abroad, at the government should assign an ambassador-at-large to oversee diplomacy in the region.

Sinonimnya : statesmanship, statecraft, negotiation(s), discussion(s), talks, dialogue. Bisa juga dikatakan sebagai the art of dealing with people in a sensitive and effective way. Sinonim dalam Bahasa Inggris diplomasi adalah tact, tactfulness, sensitivity, discretion, subtlety, finesse, delicacy, savoirOrganisasi Internasionalr faire, politeness, thoughtfulness, care, judiciousness dan prudence.

Diplomacy (from the Greek δῖπλωμα, meaning making a deal with other countries) is the art and practice of conducting negotiations between representatives of states. It usually refers to international diplomacy, the conduct of international relations through the intercession of professional diplomats with regard to issues of peace-making, trade, war, economics, culture, environment, and human rights. International treaties are usually negotiated by diplomats prior to endorsement by national politicians.

In an informal or social sense, diplomacy is the employment of tact to gain strategic advantage or to find mutually acceptable solutions to a common

challenge, one set of tools being the phrasing of statements in a non-confrontational, or polite manner.

The scholarly discipline of diplomatics, dealing with the study of old documents, derives its name from the same source, but its modern meaning is quite distinct from the activity of diplomacy.

Menurut Sir Ernest Satow "Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between governments of independent states. Yang bermakna diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antar pemerintah negara-negara merdeka. Kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungan negara-negara pengikutnya atau lebih singkat lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara negara-negara dengan cara damai".

Menurut Harold Nicholson, Diplomacy is the management of international relations by means of negotiations; the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys the business or art of the diplomats.

Menurut Ian Brownlie, "Diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang didalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi".

R.P Barston, menyatakan bahwa “ diplomasi itu menyangkut pengelolaan dari hubungan-hubungan antar negara termasuk hubungan negara-negara dengan pelaku-pelaku lainnya”.

Ivo D. Duchacek : “Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain”

Clausewitz : Perang merupakan kelanjutan diplomasi melalui sarana lain;

Hans J. Morgenthau mengatakan Diplomacy is the promotion of the national interest by peaceful means. Morgenthau juga memberikan arti diplomasi dalam arti luas dan arti sempit :

1. Dalam arti luas

Diplomacy is formation and execution of foreign policy on all levels, the highest as well as the sub-ordinate. (Diplomasi adalah pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya, dari yang tertinggi hingga yang terendah)

Jadi dalam hal ini menyangkut perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya.

2. Dalam arti sempit

Diplomasi adalah suatu medium, channel, atau cara dimana hubungan resmi antara pemerintah itu terjadi;

Menurut S.L. Roy dari berbagai definisi diplomasi yang dijelaskan di atas tampak jelas:

Pertama : bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi;

Kedua : negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara;

Ketiga : tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. Karenanya : pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi.

Keempat : teknik-teknik diplomasi sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian.

(Tetapi apabila cara damai gagal untuk menjaga kepentingan nasional, kekuatan biasanya digunakan, sehingga terdapat keterkaitan antara diplomasi dan perang).

Kelima : diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara.

Keenam : diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara;

Ketujuh : diplomasi juga tak bisa dipisahkan dari perwakilan negara.

Ruang Lingkup Diplomasi

Dalam prakteknya diplomasi harus dibedakan dengan politik luar negeri, oleh karena itu diperlukan adanya batasan diantara kedua konsep tersebut. Dimana, “ diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tetapi merupakan lembaga

untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif-kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik". Disatu pihak, kebijakan atau politik luar negeri memiliki perhatian pada substansi dan kandungan dari hubungan luar negeri, dan dipihak lain, perhatian diplomasi dipusatkan kepada metodologi untuk melaksanakan kebijakan luar negeri.

Diplomasi merupakan cara-cara yang dilakukan dalam hubungan internasional melalui perundingan, cara mana dilaksanakan oleh para duta besar ; yang merupakan pekerjaan atau seni dari diplomat. Diplomasi merupakan suatu cara berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktek-praktek negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Dengan demikian diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambalnya.

D. Tujuan Diplomasi

Kautilya, seorang diplomat kawakan India Kuno, dalam bukunya “Arthashastra” menyatakan bahwa pencapaian “Kebijaksanaan” (naya) secara tepat akan memberikan hasil yang menguntungkan.

Kautilya menekankan empat tujuan utama diplomasi yaitu :

1. Acquisition (perolehan);
2. Preservation (pemeliharaan);
3. Augmentation (penambahan);
4. Proper distribution (pembagian yang adil).

Disamping itu tujuan diplomasi Kautilya yakni “kebahagiaan” (siddhi) dan selama tujuan tersebut hanya bisa diperoleh melalui pemilikan kekuatan (power), seorang raja harus selalu berupaya untuk menambah kekuatannya sendiri dan mengangkat kebahagiaannya. Apabila gagal, sang raja, harus berusaha mencoba mengingkari hal yang sama kepada musuhnya.

Ratusan tahun yang lalu Kautilya menyimpulkan tujuan utama diplomasi untuk “pengamanan kepentingan negara sendiri”. Jadi tujuan diplomasi menurut Kautilya yaitu “untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri” dan kepentingan utama nampaknya adalah “pemeliharaan keamanan”.

Tujuan vital lainnya antara lain :

- Memajukan ekonomi;
- Perdagangan dan kepentingan komersil;
- Perlindungan warganegara sendiri di negara lain;

- Mengembangkan budaya dan ideologi;
- Peningkatan prestise nasional;
- Memperoleh persahabatan dengan negara lain, dsb.

Secara luas tujuan ini bisa dibagi menjadi empat yaitu : Tujuan Politik; Tujuan Ekonomi; Tujuan Budaya; Tujuan Ideologi.

Tujuan Politik Dari Diplomasi

Tujuan Diplomasi bagi setiap negara adalah “pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya”. Hal ini bisa dicapai dengan cara :

- Memperkuat hubungan dengan negara sahabat;
- Memelihara hubungan erat dengan negara-negara sehaluan;
- Menetralisir negara yang memusuhi.
- Kesemuanya dapat dilakukan melalui negosiasi.

E. Tugas dan Fungsi Diplomasi.

Jika berbicara mengenai tugas dari diplomasi sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas para pelakunya maupun institusinya, terutama adalah para diplomat dengan perwakilan diplomatiknya yang berada di suatu negara sebagaimana yang tercantum dalam “konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik”. Menurut Hans J Morgenthau tugas diplomasi dibagi dalam empat pokok :

Diplomasi harus membentuk tujuan dalam rangka kekuatan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu negara yang ingin

menciptakan tujuan-tujuan yang belum dicapai haruslah berhadapan dengan suatu resiko untuk perang. Karena itu diperlukan suksesnya diplomasi untuk mencoba mendapatkan tujuannya tersebut sesuai dengan kekuatannya.

Disamping melakukan penilaian tentang tujuan-tujuannya dan kekuatannya sendiri, diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara lainnya. Dalam hal ini, suatu negara haruslah menghadapi resiko akan terjadinya peperangan apabila diplomasi yang dilakukannya itu salah dalam menilai mengenai tujuan dan kekuatan dari negara-negara lain.

Diplomasi haruslah menentukan dalam hal apa perbedaan yang ada pada tujuan-tujuan itu dapat cocok satu sama lain. Diplomasi harus dilihat kepentingan negaranya sendiri dengan negara lain cocok. Jika jawabannya “tidak” maka harus dicari jalan keluar untuk merujuk kepentingan-kepentingan tersebut.

Diplomasi harus menggunakan cara-cara yang pantas dan sesuai seperti kompromi, bujukan bahkan kadang-kadang ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan.

Pengertian tentang tugas diplomasi, tidak lain hal itu menyangkut pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan didalam melakukan diplomasi yang menurut R.P Barston dapat digolongkan dalam enam bidang yang cukup luas, yaitu :

Bidang pertama yang dianggap sangat penting adalah mengenai keterwakilan yang meliputi keterwakilan murni termasuk penyerahan surat-surat kepercayaan, protokol dan keikutsertaan di dalam kegiatan-kegiatan diplomatik

yang dilakukan di ibu kota atau lembaga-lembaga pemerintahan setempat. Jika kita melihat kembali, sebenarnya aspek yang paling penting adalah keterwakilan yang bersifat substantif, yaitu mencakup bukan saja usaha-usaha untuk menjelaskan dan mempertahankan kebijakan nasional yang disalurkan melalui perwakilan-perwakilan diplomatik dan saluran-saluran luar lainnya, tetapi juga untuk melaksanakan perundingan dan penafsiran tentang kebijakan dalam dan luar negeri dari pemerintah negara penerima.

Tugas untuk melakukan tindakan sebagai tempat untuk mendengarkan atau memantau merupakan kelanjutan dari keterwakilan yang bersifat substantif. Jika berfungsi dengan benar maka, kedutaan besar sebuah negara harus dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kunci, pola-pola dalam dan luar negeri yang muncul termasuk implikasinya agar dapat memberikan informasi terkait dengan saran maupun peringatan kepada negara pengirim.

Meletakkan dasar kerja atau mempersiapkan dasar bagi suatu kebijakan atau prakarsa-prakarsa baru. Dalam hal terjadinya konflik bilateral yang meluas dan potensial maka diplomasi diupayakan untuk mengurangi ketegangan atau melicinkan roda dalam rangka memelihara hubungan secara bilateral maupun multilateral.

Untuk memperluas tujuan-tujuan tersebut, diplomasi juga berfungsi untuk menyumbang kepada perubahan-perubahan yang aman dan tertib. Pada tingkat lebih umum, tugas penting dari diplomasi adalah untuk menciptakan,

merumuskan, dan mengadakan perubahan-perubahan terhadap peraturan internasional yang luas mengenai jenis peraturan dan norma-norma yang dapat memberikan bentuk dalam sistem internasional.

BAB VIII

STUDI KAWASAN

Studi kawasan adalah studi interdisipliner (antardisiplin atau bidang studi) melibatkan sejarah, ilmu politik, sosiologi, geografi, bahasa, dan disiplin lainnya yang menganalisa fenomena sosial, politik, dan ekonomi pada suatu area dengan ciri tertentu (kawasan). Studi kawasan menganalisa fenomena-fenomena yang ada dalam suatu kawasan dan merencanakan pembangunannya di masa depan.

Studi kawasan dalam Hubungan Internasional merupakan studi interdisipliner yang menganalisa fenomena-fenomena sosial, politik, dan ekonomi pada suatu kawasan atau region yang kemudian ditarik benang merahnya dengan kehidupan

global. Studi yang mempelajari fenomena regional namun lebih lanjut dikaitkan dengan fenomena global. Fenomena-fenomena yang terjadi pada suatu kawasan bisa saja berpengaruh pada kawasan-kawasan atau negara-negara lainnya. Hal ini dikarenakan aktor-aktor dalam hubungan internasional mulai dari negara hingga individu tidak selalu memiliki latar belakang yang sama dan membutuhkan satu sama lain sehingga hal yang terjadi pada suatu kawasan tentu memiliki kemungkinan untuk memengaruhi kawasan lainnya.

Fenomena globalisasi di satu sisi menjadikan dunia menjadi lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya. Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, mendefinisikan :
“Kawasan adalah dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan.” (Perwita & Yani, 2005 : 104).
Lebih jauh, mereka membagi *subordinate system* ke dalam tiga bagian, yaitu *core sector* (negara inti kawasan), *peripheral sector* (negara pinggiran kawasan) dan *intrusive system* (negara eksternal kawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan). Mereka juga menyatakan, setidaknya ada empat variabel yang mempengaruhi terjadinya interaksi antara negara dalam

kawasan, yaitu sifat dan kohesivitas aktor yang akan menentukan tingkat interaksi diantara mereka, sifat komunikasi dalam kawasan, tingkat *power* yang dimiliki aktor kawasan dan struktur hubungan antar aktor dalam kawasan.

Karakteristik Regionalisme

Dekade 1960-an hingga 1970-an merupakan gelombang pertama analisis regionalisme yang secara khusus menekankan pada pengaruh Perang Dingin terhadap pertumbuhan institusi regional di Eropa dan negara-negara dunia ketiga. Sementara pada era 1990-an muncul gejala regionalisme baru dimana dimensi ekonomi mengemuka sebagai salah satu pendorong utama tumbuhnya pengaturan-

pengaturan kawasan. Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa terdapat tiga tahap penting dalam proses pertumbuhan regionalisme, yaitu :

“Tahap pertama disebut sebagai „*pre-regional stage*” dimana beberapa negara bersepakat untuk membentuk interaksi sosial bersama dalam suatu unit geografis tertentu. Tahap kedua adalah upaya-upaya bersama untuk menciptakan saluran-saluran formal dan informal untuk menggalang kerjasama regional yang tertata dan sistematis. Tahap terakhir adalah output dari proses regionalisasi

dimana pembentukan identitas bersama, kapasitas institusional dan legitimasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga eksistensi regional mereka diakui secara internasional.” (2005 : 107).

R. Stubbs dan G. Underhill yang dikutip oleh Perwita dan Yani dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* memberikan uraian tentang tiga elemen utama regionalisme. Elemen yang pertama yaitu, kesejarahan masalah-masalah bersama yang dihadapi sekelompok negara dalam sebuah lingkungan geografis. Elemen ini akan mempengaruhi derajat interaksi antar aktor negara di suatu kawasan. Semakin tinggi kesamaan sejarah dan masalah yang dihadapi maka akan semakin tinggi pula derajat interaksinya. Dikarenakan kesamaan sejarah dan masalah yang dihadapi akan mendorong terciptanya kesadaran regional dan identitas yang sama (*regional awarness and identity*).

Kedua, adanya keterkaitan yang sngat erat di antara mereka terhadap suatu „batas“ kawasan atau dimensi „ruang“ dalam interaksi mereka (*spatial dimension of regionalism*). Ketiga, terdapatnya kebutuhan bagi mereka untuk menciptakan organisasi yang dapat membentuk kerangka legal dan institusional untuk mengatur interaksi diantara mereka dan menyediakan „aturan main“ dalam kawasan. Elemen ini pula yang akan mendorong terciptanya derajat institusionalisasi di sebuah kawasan (2005 : 107-108).

Bentuk Bentuk Regionalisme

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukakan regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional, maka negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Bentuk tertinggi dari kerjasama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini terbagi kedalam dua tingkat, tingkat pertama disebut sebagai „integrasi dangkal“ (*shallow integration*) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Sedangkan bentuk kedua berupa „integrasi dalam“ (*deep integration*) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (*full economic and monetary union*). Bentuk berikutnya adalah „*Inter-regionalism*“ dan „*Regional transnationalism*“. Bentuk ini mengacu kepada proses kerjasama yang melibatkan aktor-aktor ekstra regional (termasuk pula aktor-aktor non negara seperti MNC) yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, politik dan kultural. Inter regionalism juga merujuk kepada perluasan hubungan antar kawasan yang dapat mengambil beberapa bentuk. Pertama adalah hubungan antar kelompok/organisasi regional seperti yang tercermin dalam kerjasama Uni Eropa dan ASEAN.

Bentuk kedua adalah hubungan *bi-regional* (dua kawasan) dan *trans regional* (antar kawasan). APEC yang terbentuk 1989 yang merupakan hasil dari

bentuk *trans-regional* yang meliputi kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara dan Selatan. Kemudian adanya ASEM (*Asia Europe Meeting*) yang merupakan bentuk dari *bi-regional* Asia dan Eropa. Lalu adanya kerjasama antara Eropa dengan Amerika Latin yang tergabung dalam *European-Latin America Summit* yang dibentuk pada 1999, serta *The Africa-EU Summit* antara negara-negara di Afrika dengan Eropa. Dan yang terakhir adalah *The East Asia-Latin America Forum* (EALAF) yang dibentuk pada 2001 antara negara-negara di Asia Timur, Australia, Selandia Baru dan Amerika Latin. Bentuk ketiga adalah hubungan antara kelompok regional dengan *single power*. Hubungan ini merupakan bentuk campuran yang menyerupai hubungan antar kawasan. Namun dalam banyak kasus hubungan semacam ini kerap kali memakai peranan dominan dalam kerjasamanya. Misalnya, mengenai peran AS yang begitu menonjol dan cenderung dominan di Eropa dan kadang mengganggu hubungan trans-atlantik AS dengan beberapa negara Uni Eropa. Dari pemaparan hal diatas, terlihat bahwa regionalisme merupakan fenomena hubungan internasional yang terus berkembang. Konsep ini tidak hanya sebatas membicarakan unsur geografis semata, bahkan dalam banyak kasus, elemen-elemen yang terkait begitu beragam, mulai dari ekonomi hingga politik keamanan. Hal ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam hubungan internasional (2005 : 110).

Beberapa Pengertian Regional Hubungan internasional terdiri atas berbagai macam interaksi antar aktor-aktor di dalamnya, baik itu aktor negara maupun non-negara. Interaksi yang timbul ini dapat berupa kerjasama ataupun konflik. Kerjasama antar negara dapat mengarah pada suatu fenomena yang disebut 'regionalisme' Regionalisme adalah seperangkai sika, kesetiaan, dan ide-ide yang menyatukan pikiran individu dan kolektif dari masyarakat atas apa yang mereka persepsikan sebagai wilayahnya. Di dalam studi Hubungan Internasional, Regionalisme memiliki irisan studi yang sangat erat dengan 'Studi Kawasan (Area Studies)'. Bahkan, dalam aplikasi analisis, istilah region (kawasan) dengan regionalisme sering kali tumpah tindih.

Menurut Mansbaach, region atau kawasan adalah "Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketegantungan ekonomi yang saling menguntungkan (Interdependensi), komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional". Dalam bukunya yang berjudul Studi Kawasan: Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia, Teuku May Rudy menyatakan bahwa:

"Dalam Studi Kawasan, yang lazim disebut pula Studi Wilayah (Area Studies), terdapat tiga model atau kajian utama, yaitu: (1) Kajian Ciri-ciri Khusus (typical Studies), (2) Kajian Peristiwa-peristiwa (Study of Events), dan (3) Kajian

Kecendrungan Regionalisme (Regionalism) dan Organisasi Kerjasama Regional (Regional Cooperations).

Selanjutnya T. May Rudy (1997), menegaskan bahwa hal terpenting dalam kajian regionalisme adalah meninjau derajat keeratan (level of cohesion), struktur dalam pelaksanaan peran atau percaturan politik (structure of relations) dalam suatu kawasan, serta rasa kebersamaan yang mewarnai tumbuhnya kerja sama regional tersebut.

Merujuk pada aktivitas kerjasama regional yang menunjukkan interdependensi termasuk negosiasi-negosiasi bilateral sampai pembentukan rezim yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah bersama terutama yang timbul dari meningkatnya tingkat interdependensi regional. Disamping itu, kerjasama regional mungkin mengarah pada terciptanya institusi formal, namun dengan struktur yang longgar, berupa pertemuan-pertemuan rutin yang menghasilkan aturan-aturan sekaligus dengan mekanisme pelaksanaan dan persiapan untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut (Hurrel, 1995: 42).¹³

Istilah regionalisme berasal dari kata 'regional' ditambah 'isme'. Region dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu

negara yaitu nation-state. Sedangkan regional merupakan dua atau lebih negara (nation-state) yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka regionalisme dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama regional.

Sedangkan menurut Joseph Nye, yang dimaksud dengan region internasional adalah kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka Nye menyatakan bahwa regionalisme merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi region. Pemikiran Nye ini menunjukkan bahwa regionalisme dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan fisik, seperti letak geografis negara-negara anggotanya.

Berbeda dengan Nye, Ravenhill justru berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang 'murni' region, regionalisme hanyalah suatu rekaan atau konstruksi sosial dari anggotanya yang mendefinisikan batas-batas region tersebut

Regionalisme merupakan konsep dalam hubungan internasional yang banyak dibicarakan oleh para praktisi maupun akademisi hubungan internasional.

Secara praktis, konsep ini sering digunakan secara silih berganti dengan konsep region/kawasan, subregion/sub-kawasan, atau subsistem.

Sejarah Munculnya Regionalisme

Sejarah awal kemunculan regionalisme ini tidak dapat dipahami secara pasti, namun adanya regionalisme dalam hubungan internasional dipahami oleh Louise Fawcett dengan adanya kesadaran regional dan keinginan negara-negara untuk melakukan sesuatu yang terbaik di lingkungan regional mereka.

Regionalisme seperti yang dinyatakan oleh Fawcett ini merupakan regionalisme tradisional yang terjadi di era sebelum perang dingin. Motif-motif regionalisme era ini lebih bersifat politis, karena pasca Perang Dunia 2 negara-negara di dunia memandang security sebagai sesuatu yang sangat penting. Sehingga dibutuhkan suatu 'collective security' yang dapat menjamin keamanan mereka. Pada era perang dingin, regionalisme terbentuk akibat adanya dua blok yang saling berseteru yaitu blok barat dan blok timur. Selain itu, terbentuk pula Gerakan Non-Blok (GNB) yang tidak memihak pada salah satu blok tersebut.

Pada era sesudah perang dingin, muncul yang dinamakan 'new regionalism' atau suatu bentuk regionalisme baru. Adanya fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain berakhirnya perang dingin yang juga mengakhiri blok-blok pada era tersebut. Hal ini membawa konsekuensi pada timbulnya keinginan

untuk mewujudkan suatu kerjasama internasional yang lebih dilandasi akan motif-motif ekonomi.

Salah satu contoh adalah dengan adanya Free Trade Area (FTA), seperti (Asean Free Trade Area) AFTA atau (North Atlantic Free Trade Area) NAFTA. Pembentukan regionalisme semacam ini didasarkan atas motif ekonomi yang juga dilandasi pertimbangan geografis negara-negara anggotanya. Dalam artikel Ravenhill, menurut para ekonom kesejahteraan ekonomi dapat dicapai lebih maksimal jika hambatan-hambatan dikurangi, namun hal ini dibantah oleh para ilmuwan politik yang menyatakan bahwa perdagangan regional semacam ini hanya akan mengurangi kesejahteraan dalam konteks global.

Lebih lanjut mereka menuturkan bahwa akan lebih efisien melakukan suatu negosiasi dengan banyak negara daripada dengan suatu negara atau suatu grup kecil. Asumsi para ekonom tersebut diyakini sebagai salah satu motif terbentuknya Uni Eropa yang menjadikan Eropa sebagai suatu pasar tunggal bagi negara-negara anggotanya. Di sisi lain, secara implisit penulis memandang bahwa pemikiran para ilmuwan politik tersebut justru memberikan justifikasi akan terbentuknya kerjasama ekonomi internasional yang diwujudkan dalam bentuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

. Teori memiliki arti penting dalam membuat berbagai proses dan perkembangan dalam regionalism -seperti proses regionalisasi ekonomi dan

sosial, pertumbuhan identitas regional, formasi dari institusi antar regional dan kemunculan blok politik regional- menjadi lebih mudah dimengerti sekaligus menggunakan teori tersebut dalam studi kasus.

Dalam menjelaskan regionalisme kemudian, ada beberapa teori yang dapat digunakan:

a. Teori Sistem

Teori ini menggarisbawahi pentingnya struktur ekonomi dan politik yang lebih luas serta dampak yang dapat diberikan oleh pihak luar terhadap region itu sendiri.

Teori ini memiliki 2 pandangan utama:

Pandangan pertama, neorealisme, menitikberatkan pada sistem internasional yang anarki serta pentingnya kompetisi power dan politik. Neorealisme juga concern terhadap ancaman dan pengaruh pihak eksternal terhadap suatu region. Aliran ini tidak terlalu memikirkan apakah regionalisme berjalan dalam ranah politik atau ekonomi karena para neorealis melihat politik dan kompetisi ekonomi merkantil sebagai pembentuk power yang dibutuhkan dalam dunia tanpa pemerintahan (anarki).

Karena dunia adalah anarki, maka neorealis menganggap pentingnya hegemoni yang dapat diwujudkan dalam institusi regional. Hegemoni menguat

dalam kerangka institusi. Hal ini diperkuat oleh theory of hegemonic stability dimana pembentukan kerjasama institutional bergantung pada ketidakmerataan power dalam keberadaan hegemoni. Bila negara dengan power lebih besar berusaha menjadikan institusi regional sebagai sarana hegemoni legal, maka negara dengan power lebih kecil menggunakan institusi regional sebagai senjata perlawanan terhadap dominasi negara superpower.

Kelebihan aliran neorealisme ini terletak pada kemampuannya menjelaskan pentingnya kekuatan eksternal dan kuatnya hegemoni. Aliran ini juga menjelaskan dengan baik bagaimana logika tentang interaksi strategis para aktor dalam kerangka institusi regional. Namun kelemahannya aliran ini hanya berbicara sedikit tentang berbagai karakter kerjasama regional sebagai ciri khusus yang membedakan regionalisme dari komunitas lain seperti aliansi dan Organisasi Internasional.

Pandangan kedua, interdependensi struktural dan globalisasi, yang muncul sebagai kritik terhadap diabaikannya dinamika perubahan struktur oleh neorealis. Para penganut aliran interdependensi struktural dan globalisasi -Nye, Keohane dan Morse- mengemukakan pandangan mereka tentang perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem internasional, yaitu meluasnya globalisasi sejak era 1990an.

Para penstudi memandang regionalisme sama kompleksnya dengan konstelasi global karena sifat multidimensi dalam regionalisme tidak hanya

membahas negara tetapi juga semua unsur-unsur kekuatan di dalamnya seperti perusahaan dan kelompok sosial. Para penstudi lain memandang regionalisme sebagai kritikan untuk globalisasi serta terhadap strategi yang dilakukan aktor untuk menghadapi globalisasi. Mereka juga menekankan pentingnya sistem politik yang mengatur distribution of power yang merupakan faktor penting untuk menjelaskan pola regionalisme antar waktu.

Kaum realis menganggap ketidakmerataan power memunculkan pemikiran otonom yang tidak bisa diatasi oleh pasar kapitalis dan civil society. Globalisasi memunculkan perubahan di bidang regulasi massive dalam supra-state level dan memunculkan administrative government.

Globalisasi menempatkan batas region lebih berarti daripada batas negara. Dalam hubungannya dengan institusi regionalis ala kaum liberalis, ada kalanya globalisasi bertentangan dengan regionalisme dan ada kalanya keduanya saling mendukung. Regionalisme bertentangan dengan globalisasi ketika globalisasi menyebabkan interdependensi antar negara meluas dan memunculkan masalah-masalah yang membutuhkan perhatian global seperti pengungsian dan kejahatan kemanusiaan.

Dalam isu global ini, peranan Organisasi Internasional lebih diperlukan daripada organisasi regional. Selain itu penyebaran organisasi regional juga dirasa lebih 'kebarat-baratan' sehingga norma dan identitas organisasi regional menjadi

kabur. Globalisasi dapat menjadi katalis regionalisme ketika kebutuhan untuk mengadakan integrasi dalam kawasan meningkat. Selain itu organisasi regionalis dibutuhkan untuk menangkal efek kapitalisme yang dibawa oleh globalisasi yang mengancam perekonomian.

b. Regionalisme dan Interdependensi

Akhir Perang Dunia membuat dominasi superpower hilang sehingga kekuatan regional mulai mencoba mendominasi. Interdependensi antar region memunculkan konflik keamanan dari dalam sekaligus ancaman intervensi dari luar. Keadaan ini memunculkan kebutuhan untuk keamanan politik walaupun usaha ini diselubungi dengan 'wajah' institusi ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, interdependensi adalah ciri khusus yang jelas terlihat dalam regionalisme.

Teori ini menyertai 3 pandangan utama tentang interdependensi dan kerjasama.

Pandangan pertama, neofungsionalisme berpendapat bahwa peningkatan interdependensi akan memunculkan kerjasama yang pada akhirnya membuahakan integrasi politik.

Pandangan kedua, neoliberal-institusionalisme memandang keberadaan institusi sebagai jawaban atas kebutuhan collective action. Institusi ini penting mengingat banyaknya keuntungan yang dapat diberikan kepada negara-negara

yang tergabung di dalamnya. Pandangan ini kemudian fokus pada pola interaksi strategis yang dilakukan para aktor untuk meningkatkan kerjasama.

Pandangan terakhir menitikberatkan pada identitas regional sehingga lebih memandang regionalisme dari tatanan sosial daripada ekonomi. Aliran ini disebut konstruktivisme, membangun konstruksi sosial untuk meningkatkan integrasi dan kohesi regional.

c. Teori Intra Regional

Teori ini memasukkan teori Heartland karya Mackinder yang pada awalnya bertujuan untuk menciptakan pasar bersama dalam kepentingan ekonomi transnasional. Regionalisme Institusi regional dipandang sebagai solusi yang ditujukan untuk berbagai masalah collective action yang ditimbulkan oleh interdependensi karena institusi mempengaruhi pembuatan keputusan dalam perhitungan cost and benefit, mengurangi biaya transaksi, menyediakan informasi dan transparansi serta memfasilitasi pelaksanaan.

d Teori dalam level domestic

Dalam level domestik, organisasi regional dilihat dari kesamaan internal yang dimiliki negara anggota seperti sejarah, tradisi, bahasa, etnis, dsb. Fokusnya

adalah melihat regionalisme dari kacamata hubungan regionalisme dengan koherensi negara serta tipe rezim dan demokratisasi.

teori domestik ini kurang relevan diterapkan dalam negara berkembang yang mayoritas memiliki pluraritas kependudukan. Bila teori domestik menganggap bahwa kesamaan internal merupakan aspek penting dalam regionalisme dimana kemudian teori ini dapat dihubungkan dengan konstruktivisme dalam kaitannya dengan identitas regional, maka negara berkembang yang rata-rata merupakan bekas daerah kolonial dimana unsur-unsur barat juga melebur dalam budaya mereka, tidak sesuai dengan teori domestik ini, Karena walaupun katakanlah ASEAN, memiliki ketidaksamaan internal, namun ternyata organisasi regional ini dapat diperhitungkan sebagai kekuatan potensial yang mendorong Jepang, Cina dan Korea bergabung dalam ASEAN + 3.

B. Karakteristik Regionalisme

Joseph S. Jr. Nye, seorang teoritis Hubungan internasional dari AS yang cukup terkemuka mengemukakan bahwa konsep ini bersifat ambiguous.

Lima karakteristik di dalam mengklasifikasikan suatu kawasan, yaitu :

1. negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis.
2. Mereka memiliki pula kemiripan sosiokultural.

3. Terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam Organisasi Internasional.
4. Kesamaan keanggotaan dalam Organisasi Internasional.
5. Adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Sementara itu, menurut Coulumbis dan Wolfe, dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relation, Power and Justice*, terdapat empat cara atau kriteria yang bisa dipergunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah kawasan atau region yang sebenarnya sangat ditentukan oleh tujuan analisisnya. Keempat kriteria tersebut adalah:

1. Kriteria geografis: mengelompokan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan sebagainya seperti Eropa dan Asia.

2. Kriteria politik/militer: mengelompokan negara-negara dengan berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO dan Non-Blok.

3. Kriteria ekonomi: mengelompokan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti, GNP, dan

output industri, misalnya negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau terbelakang.

4. Kriteria transaksional: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat pada wilayah Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.

Kemudian, Bruce Russett juga mengemukakan kriteria suatu region, yaitu:

1. Adanya kemiripan sosiokultural;
2. Sikap politik atau perilaku eksternal yang mirip, yang biasanya tercermin pada voting dalam sidang-sidang PBB;
3. Keanggotaan dalam organisasi-organisasi supranasional atau antar pemerintah;
4. Interdependensi ekonomi, yang diukur dengan kriteria perdagangan sebagai proporsi pendapatan nasional; dan
5. Kedekatan geografik, yang diukur dengan jarak terbang antara ibukota-ibukota negara-negara tersebut.

C. Bentuk-Bentuk Regionalisme

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatukawasan untuk mencapai tujuan regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional dan atau

menjadi anggota organisasi regional, negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Dengan kata lain, negara-negara dalam suatu kawasan telah melakukan distribusi kekuasaan diantara mereka untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk Integrasi ini dibagi menjadi dua tingkat.

Bentuk pertama disebut sebagai “integrasi dangkal (shallow integration) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi kendala-kendala perdagangan. Bentuk kedua berupa “integrasi dalam (deep integration) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (full economic and monetary union). Bentuk berikutnya adalah ‘inter-regionalism’ dan ‘regional transnationalism’.

Bentuk kedua mengacu pada proses kerjasama yang melibatkan aktor-aktor ekstra regional (termasuk pula aktor-aktor non negara seperti MNC) yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, politik dan kultural.

Bentuk selanjutnya adalah hubungan bi-regional (dua kawasan) dan transregional (antar kawasan). Hingga kini, paling tidak, tercatat lima hubungan bi-regional dan transregional yang mencakup kawasan Amerika, Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika.

Bentuk ketiga dari regionalisme adalah hubungan antara kelompok regional dengan single power. Hubungan ini merupakan bentuk campuran yang

menyerupai hubungan antar kawasan. Namun dalam banyak kasus hubungan ini, single power kerap kali memainkan peranan dominan dalam kerjasama tersebut. Hal ini misalnya terlihat cukup jelas mengenai peran AS yang begitu menonjol dan cenderung dominan di Eropa dan kadang mengganggu hubungan transatlantik AS dengan beberapa negara Uni Eropa.

BAB IX

KEAMANAN GLOBAL

Sebagian besar kajian mengenai security tidak hanya memusatkan perhatian kepada isu-isu terkait maritim. Christopher Rahman menyebutkan perdebatan teoritis mengenai masalah "security" di dalam hubungan internasional dan berkembang menjadi sub disiplin *security studies* dapat dilacak pada awal 1980-an yang menjadi puncak dari Perang Dingin. Pemahaman security ini berkembang

dari pengertian asalnya yang semata-mata bersifat strategis militer pada era Perang Dingin yang berakhir akhir 1980-an.

Keamanan atau security saat itu diartikan untuk menguasai kawasan strategis seperti terjadi di saat pemisahan Berlin, Jerman pada akhir Perang Dunia II. Konsep keamanan pasca Perang Dingin melebar dari sekedar hanya persoalan militer semata menjadi keamanan dalam pengertian tidak hanya dirasakan di global, regional, tingkat negara tapi juga tingkat individual manusia.

Barry Buzan menyebutkan bahwa konsep keamanan hanya dapat dipahami dengan mengintegrasikan tingkat analisis dan dimensi keamanan.⁵ Buzan membagi analisis itu menjadi tingkat individual, nasional dan internasional baik keamanan regional maupun sistem yang lebih luas. Sedangkan dimensi keamanan terdiri dari keamanan militer, politik, *societal*, ekonomi dan lingkungan. Beberapa ilmuwan lain menggunakan kategori berbeda seperti *energy security*, *food security*, *transnational crime* dan migrasi. Namun isu ini masih dapat dimasukkan dalam sub tema pembahasan security.

Konsep keamanan yang berkembang seperti digambarkan Peter Hough merupakan penerjemahan konsep yang diajukan Buzan.⁶ Pengertian yang luas tentang makna keamanan ini telah banyak diterima. Keamanan tidak hanya bebas ancaman dari sisi negara dan system internasional tetapi juga sampai pada

⁵ Barry Buzan. 1991. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Harrow: Longman. Hal. 4.

⁶ Peter Hough. 2008. *Understanding Global Security*. London: Routledge. Hal 12.

tahapan individual. Hal ini terkait dengan apa yang disebut Buzan sebagai level analysis. Dengan perangkat level analysis ini lebih teridentifikasi keamanan seperti apa yang terjadi di berbagai tingkat system mulai dari individual sampai dengan system internasional. Bahkan kajian yang memfokuskan kepada system internasional juga semakin berkembang dengan adanya pandangan mengenai regional security complex dimana satu regional memiliki karakter keamanan yang berbeda dengan kawasan lainnya.

Table 1.2 Narrow, wide and deep conceptions of security

<i>Referent object of security</i>	<i>Types of issues</i>	
	<i>Military</i>	<i>Non-military</i>
	<i>Using military means</i>	<i>Unsolvable by military</i>
State	Narrow	Wide
Non-state actor		Copenhagen School
Individual		Human Security

Level Analisis: Individual Security

Buzan menjelaskan untuk melihat security dapat dimulai dari tingkat individual keamanan individual atau security of individual dan komunitas seperti etnik keagamaan, suku dan identitas kelompok lainnya berhubungan langsung dengan kualitas keamanan dengan negara dan sejauh mana negara dapat melindungi kelompok ini. Tingkat analisis seperti itu disebut juga sebagai "human security". Tingkat hubungan individual ini dengan negara ini bisa bersifat positif,

negatif dan netral. Artinya negara dapat meningkatkan keamanan individual dan kelompok dengan peluang ekonomi, tertib hukum atau kesejahteraan sosial.

Sebaliknya negara juga dapat mengancam individual dan kelompok dengan berbagai kebijakannya. Dalam konteks level analisis ini bisa terjadi konflik antara keamanan individual dengan kebebasan individual. Semakin tinggi tuntutan akan security oleh individual semakin besar kebebasan harus dilepaskan. Demikian juga sebaliknya semakin rendah keamanan individual yang diminta semakin tinggi kebebasan. Buzan mencatat semakin tinggi kekuasaan negara, semakin tinggi negara akan menjadi ancaman kepada individual.

Banyak aspek dalam isu ancaman terhadap individu bisa berarti bukan keamanan bukan kepada negara. Sebagai contoh isu dampak kebebasan perdagangan terhadap sejumlah sektor industri dan individu tidak berarti mengganggu kinerja ekonomi secara nasional. Bahkan kadang-kadang globalisasi atau kebebasan perdagangan memberikan dampak positif secara nasional. Namun demikian Buzan mengatakan karena pentingnya analisis keamanan level negara dan sistem maka tekanan terhadap keamanan nasional dan internasional harus menjadi "fokus analisis".

National Security

Level analisis kedua versi Buzan memfokuskan kepada negara yang didefinisikan sebagai entitas yang memiliki teritorial dan berdaulat secara politik. Istilah "keamanan nasional" (national security) dan "kepentingan nasional"

(national interest) merupakan pengertian lebih populer sebagai slogan politik dan kelompok kepentingan untuk membenarkan kebijakan pemerintah. Keamanan nasional biasanya lebih fokus kepada masalah pertahanan dan strategis. Sedangkan kepentingan nasional biasanya digunakan untuk kepentingan yang lebih luas.

Arnold Wolfers dikutip Christopher Rahman mengatakan, "national security" merupakan "simbol yang mendua" yang dapat menipu dan mungkin tidak memiliki arti apa-apa ketika dijadikan label bagi sebuah kebijakan.⁷ Mendefinisikan keamanan sebagai "tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang ada" juga menimbulkan hal yang membingungkan seperti disebutkan Wolfers, sama dengan istilah keamanan nasional digunakan tanpa spesifikasi khusus.

Sementara itu David Baldwin merangkum istilah security sebagai "kemungkinan yang terendah terhadap kerusakan nilai-nilai yang ada".⁸ Namun muncul pertanyaan seperti keamanan untuk siapa? Keamanan untuk nilai-nilai apa? Seberapa aman? Dari ancaman mana? Dengan cara apa? Dengan resiko apa? Dan dalam periode kapan? Oleh karena itu Baldwin menegaskan spesifikasi minimum seperti "cara, resiko dan periode waktu harus spesifik untuk perbandingan sistematis kebijakan alternatif."

⁷ Christopher Rahman.2009. *Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand* Wellington, NZ : Centre for Strategic Studies: New Zealand, Victoria University of Wellington.

⁸ David A. Baldwin, "The Concept of Security," dalam *Review of International Studies*, Vol. 23, No. 1, January 1997, pp. 12-18.

International security

International security atau keamanan internasional berkaitan dengan faktor sistemik yang mempengaruhi perilaku negara dan implikasinya untuk keamanan berbagai negara. Meskipun negara tidak hanya aktor dalam sistem internasional, namun negara adalah lembaga yang memegang tanggung jawab utama untuk menyediakan keamanan kepada warganya.

Organisasi Internasional mungkin memainkan peran pendukung untuk menyediakan keamanan ke berbagai komunitas di tingkat analisis yang berbeda seperti distribusi pangan kepada korban kelaparan, pembangunan bangsa sebuah negara baru, pembangunan kembali setelah bencana alam, meringankan pengaruh krisis finansial atau melindungi lingkungan dari kerusakan. Tindakan Organisasi Internasional itu sendiri merupakan aksi bersama berbagai negara. Organisasi Internasional bukanlah aktor berdaulat dalam sistem internasional dan tergantung terhadap tingkat kerjasama antara negara untuk berfungsi dengan efektif.

Karakter sistem internasional disebut sebagai sesuatu yang anarki yang berarti tidak ada kekuatan dominan yang mengendalikan sistem. Pemahaman tentang sistem internasional ini kemudian berkembang menjadi bipolar dan multipolar. Level analisis yang dikemukakan Barry Buzan ini kemudian

berkembang secara detil seperti disebutkan Paul R. Viotti and Mark V Kauppi dalam tabel berikutnya.⁹

TABLE 2.1	
Levels of Analysis: A More Detailed Look	
Individual Level (domain of psychology)	<ul style="list-style-type: none"> Human nature and psychology Leaders and beliefs systems Personality of leaders Cognition and perception or misperception
Group Level (domain of social psychology)	<ul style="list-style-type: none"> Government bureaucracies Policy making groups Interest groups Other nongovernmental organizations
State and Societal (or National) Level	<ul style="list-style-type: none"> Governmental <ul style="list-style-type: none"> Structure and nature of political system Policymaking process Societal (domain of sociology) <ul style="list-style-type: none"> Structure of economic system Public opinion Nationalism and ethnicity Political culture Ideology
International—World (or Global) Level	<ul style="list-style-type: none"> Anarchic quality of international or world politics Number of major powers or poles Distribution of power/capabilities among states Level and diffusion of technology Patterns of military alliances Patterns of international trade and finance International organizations and regimes Transnational organizations and networks Global norms and international law

⁹ Paul R. Viotti and Mark V Kauppi.2013. *International Relations and World Politics*. Boston: Pearson. Hal. 29.

Tabel ini menunjukkan bahwa konsep level analysis telah berkembang pesat sehingga tidak hanya terbagi tiga level utama seperti dikemukakan Buzan. Dalam level individual Buzan menjelaskan bahwa keamanan nasional sebuah negara tetap mempertimbangkan level individual ini. Yang dimaksud level individual di sini bisa termasuk karakter dari pemimpin nasional sebuah negara dalam menciptakan keamanan. Seorang pemimpin yang memiliki sifat dan karakter keras cenderung memicu konfrontasi dengan negara tetangganya. Ini merupakan kajian tingkat individual dalam melihat security. Dalam tahap berikutnya sebelum level state terdapat juga level group antara lain termasuk di dalamnya birokrasi. Di negara-negara demokrasi yang mapan kelompok pengambil keputusan tidak dapat dilepaskan dari peran kelompok ini termasuk di dalamnya adalah kelompok kepentingan. Dari gambaran tersebut tampak bahwa level analisis mulai individual sampai system internasional memiliki rincian lebih lanjut.

Pandangan tradisional mengenai security studies memfokuskan kepada fenomena perang.¹⁰ Namun pandangan dari Critical Security Studies menyebutkan, ekspansipasi membebaskan manusia dari hambatan fisik dan kemanusiaan yang menghentikan mereka dari kebebasan memilih. Security dan emansipasi adalah dua muka dari satu kOrganisasi Internasionaln yang sama.

¹⁰ Peter Hough, Shahin Malik, Andrew Moran and Bruce Pilbeam, *International Security Studies Theory and Practice*. Hal 7.

Emansipasi bukan kekuasaan memerintah, menghasilkan keamanan yang sejati. Emansipasi secara teoritis adalah security.

Dari perspektif Human Security, melindungi vital core semua kehidupan manusia dalam cara yang meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan kemanusiaan. Human Security berarti perlindungan kebebasan fundamental, kebebasan yang merupakan esensi dari kehidupan. Ini berarti perlindungan dari ancaman besar dan meluas. Ini berarti penggunaan proses yang membangun kekuatan dan aspirasi manusia. Ini berarti menciptakan system politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer dan kebudayaan yang bersama-sama memberikan orang bekal untuk bertahan, hidup dan bermartabat.

Peter Hough, Shahin Malik, Andrew Moran and Bruce Pilbeam dalam *International Security Studies Theory and Practice* juga menyebutkan bahwa security memiliki berbagai pandangan. Kaum feminis mengkritik pendekatan berpusat kepada negara yang menekankan maskulinitas. Perspektif feminis menawarkan kedalam teoritis serta mekanisme praktis bagaimana gabungan nilai maskulin dan feminim memberikan kontribusi dalam human security di atas state security.

Dalam kajian Buzan disebutkan pula selain tingkat analisis ada pula yang disebut Dimensi-dimensi Keamanan (Dimensions of Security). Dimensi keamanan menurut Buzan menyangkut kategori militer, politik, masyarakat, ekonomi dan

lingkungan.¹¹ Diantara kategori tersebut politik dan militer termasuk yang populer karena dalam sejumlah peristiwa sejarah seperti Perang Dunia I dan II. Menurut Buzan dimensi masyarakat (societal) diantaranya menyangkut perlindungan identitas dan budaya nasional. Economy security dapat diterapkan kepada semua tingkat analisis yang berbeda. Misalnya, keamanan individual akan terancam jika tidak adanya syarat dasar untuk bertahan. Kesulitan ekonomi individual dapat menyebabkan negara lemah dan akan memiliki dampak terhadap keamanan internasional jika terjadi perang sipil yang dapat meluber ke wilayah di luar perbatasan negara. Di dalam keamanan ekonomi Asia Pasifik terhadap unsur kuat dari maritim. Seafood menjadi sumber utama protein banyak warga dan perikanan menjadi industri besar, akan menjadi ancaman jika persediaan ikan menipis dan lingkungan rusak. Di Asia Tenggara sekitar 100 juta orang tergantung kehidupannya akan laut sebagai sumber protein dan pendapatan.

Environmental Security atau Keamanan Lingkungan banyak mendapat perhatian internasional pada akhir 1980-an. Kajiannya menekankan kepada perlunya mendefinisikan ulang ancaman lingkungan terhadap individual, nasional, regional dan dunia. Peningkatan kesadaran akan rawannya lingkungan alam dan semakin bertambahnya bahaya dari masalah lingkungan yang berpotensi skala global seperti perubahan iklim, kehancuran ekosistem dan penggunaan sumber

¹¹ Barry Buzan. 1991. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Harrow: Longman. Hal. 19.

daya alam yang tidak dapat diperbarui, meluasnya polusi dan bertambahnya jumlah populasi, telah menciptakan opini untuk mengakui ancaman tersebut.

BAB IX

EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Ekonomi politik internasional menjadi kajian dalam studi hubungan internasional sejak tahun 1970-an. Pada saat itu negara-negara di dunia sedang mengalami krisis minyak yang di sebabkan oleh pemboikotan pasokan minyak bumi oleh negara-negara Arab. Hal tersebut menggoyahkan stabilitas politik dan ekonomi negara-negara di dunia, sehingga krisis ini menjadi awal timbulnya kesadaran para pemegang otoritas pemerintahan bahwa faktor ekonomi sangat penting dan menentukan proses politik. Pemahaman bahwa terdapat jalinan yang saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan antara faktor ekonomi dan politik, serta antara negara dengan pasar semakin diakui.

Ekonomi politik internasional menurut Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul *The Political Economy of International Relations*, secara umum adalah "Studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional yang muncul akibat berkembangnya masalah masalah yang terjadi dalam sistem internasional". Pengkajian Ekonomi politik internasional membutuhkan integrasi teori-teori dari disiplin ekonomi dan politik, misalnya didalam masalah isu perdagangan internasional, moneter, dan pembangunan ekonomi. Sehingga dapat pula dinyatakan bahwa ekonomi politik internasional sebagai berikut :

"Ekonomi politik internasional adalah sebuah studi tentang masalah internasional yang terfokus pada elemen-elemen interdependensi kompleks yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari (Spero, 1999:43). Menurut Joan Edelman Spero, dalam bukunya yang berjudul *The politics of International Economic Relations*.

"Ekonomi politik internasional merupakan perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya, maka sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam arena internasional, pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mengandung interaksi yang bersifat ekonomi politik internasional" (Spero, 1985:10).

Lebih lanjut Spero mengemukakan bahwa ada empat cara faktor politik mempengaruhi ekonomi, yaitu:

"1) Struktur dan operasi sistem ekonomi internasional dipengaruhi oleh struktur dan operasi politik internasional. 2) Kepedulian-kepedulian politik selalu mempengaruhi kebijakan ekonomi. 3) Kebijakan-kebijakan ekonomi dituntun oleh kepentingan politik. 4) Hubungan dalam ekonomi internasional adalah hubungan politik interaksi ekonomi internasional, dan hubungan politik adalah proses dimana negara-negara dan aktor non-negara mengatur konflik dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.(Spero, 1985:5). Sumber diatas menjelaskan bahwa dalam Hubungan Internasional, selain menjalin hubungan antar negara untuk mencegah terjadinya konflik, juga dapat dilakukan hubungan yang positif lainnya dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.

Menurut T.May Rudy dalam bukunya *Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* "Ekonomi Politik internasional memberikan dan menyediakan kerangka kerangka konseptual dalam menganalisis dan menampung kenyataan kenyataan yang kompleks dan saling berkaitan mengenai berbagai masalah dalam Hubungan Internasional kontemporer" (May Rudy, 1992:52-53).

Berdasarkan teori diatas bahwa ekonomi politik internasional dapat menjadi sebuah konsep atau pemikiran dalam terjadinya hubungan internasional saat ini, karena ekonomi politik internasioanal telah memberikan dan menyediakan

kerangka-kerangka konseptual dalam menganalisis kenyataan hubungan internasional yang terjadi saat ini.

Menurut David N. Balaam dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Political Economy*, berpendapat bahwa :
"Ekonomi Politik Internasional adalah hubungan kerjasama antara negara negara dalam kerangka produksi, distribusi kekayaan dan kekuasaan, investasi, dan lain-lain. Dalam tinjauan EPI bahwa perlu adanya pendekatan level analisis terhadap individu, negara, dan sistem internasional" .

Berdasarkan konsep pemikiran diatas, ekonomi-politik internasional secara sederhana menjelaskan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi, yang didefinisikan sebagai dinamika interaksi antara pengejaran kekuasaan dan kekayaan. Berbicara mengenai Ekonomi Politik Internasional tidak akan lepas membahas tentang Ilmu Ekonomi itu sendiri, menurut Samuelson Nordhaus dalam bukunya Ilmu Makro Ekonomi, Ilmu Ekonomi memiliki pengertian "Kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat luas".

BAB XI

GLOBALISASI

Secara etimologis atau asal usul kata, globalisasi dari kata globe (bahasa Inggris) yang berarti dunia. Dari itu, dikenal istilah globalisasi (globalization) yang berarti proses mendunia. Menurut Perwita dan Yani globalisasi adalah the extension of social relations over the globe atau perluasan hubungan sosial di muka bumi

Globalisasi sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Menurut Thomas L. Friedman globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia.

Menurut Achmad Suparman Globalisasi adalah sebuah proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dan setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah.

Selo Soemardjan menjelaskan globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi komunikasi antarmasyarakat di seluruh dunia. Tujuan globalisasi adalah untuk mengikuti sistem dan kaidah kaidah tertentu yang sama misalnya terbentuknya PBB, OKI. George C. Lodge menyatakan *Globalization is a fact and a process.*



Fenomena globalisasi seperti dijelaskan oleh Prof Dr Jamal Wiwoho dapat

disimak dalam gambar berikut:



Sedangkan dimensi globalisasi dapat dipahami dalam bagan berikut:



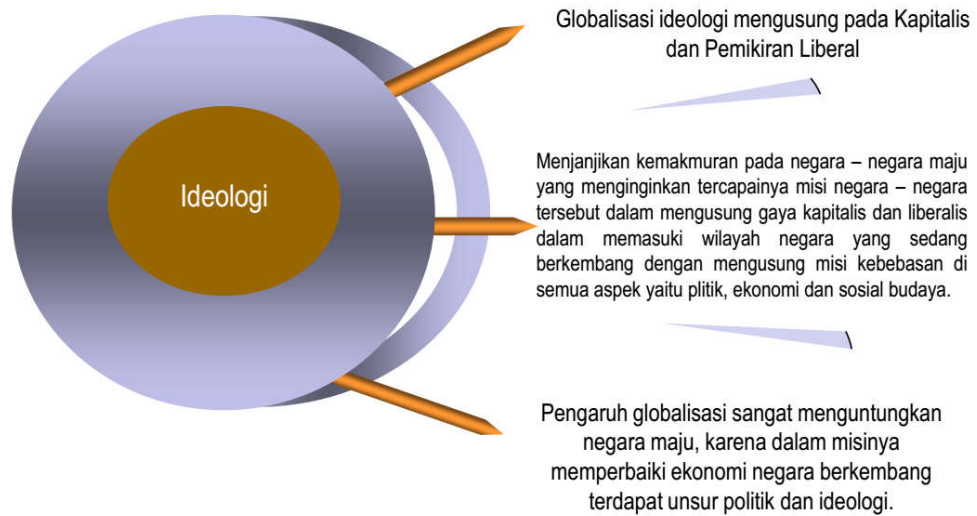
Aktor yang berperan dalam globalisasi adalah

- 1 Negara yang dipetakan secara dikotomis, yaitu negara – negara besar dan negara – negara kecil, negara – negara maju dan negara – negara berkembang, dll.
 - Organisasi antar pemerintah (IGO atau International Governmental Organizations) seperti ASEAN, NATO, European Community.
- 2 Perusahaan internasional yang dikenal dengan Multinasional Corporation (MNC) atau Transnational Corporation atau Global Firms. Perusahaan – perusahaan ini dengan modalnya yang besar dan bersifat deterritorialis meluaskan jaringannya ke segala penjuru dunia.
 - Organisasi Internasional atau Transnasional yang Non Pemerintah (NGO – Non Governmental Organizations) seperti Palang Merah Internasional, Workingmen's Association (Socialist International), International Women's League for Peace and Freedom.
- 3 Organisasi Non Formal, rahasia dan setengah rahasia, seperti mafia, teroris, pembajak, penyelundup, tentara bayaran, hacker komputer dan organisasi semacam Al-Qaeda.

Sedangkan globalisasi ekonomi dapat dipahami dari bagan berikut:



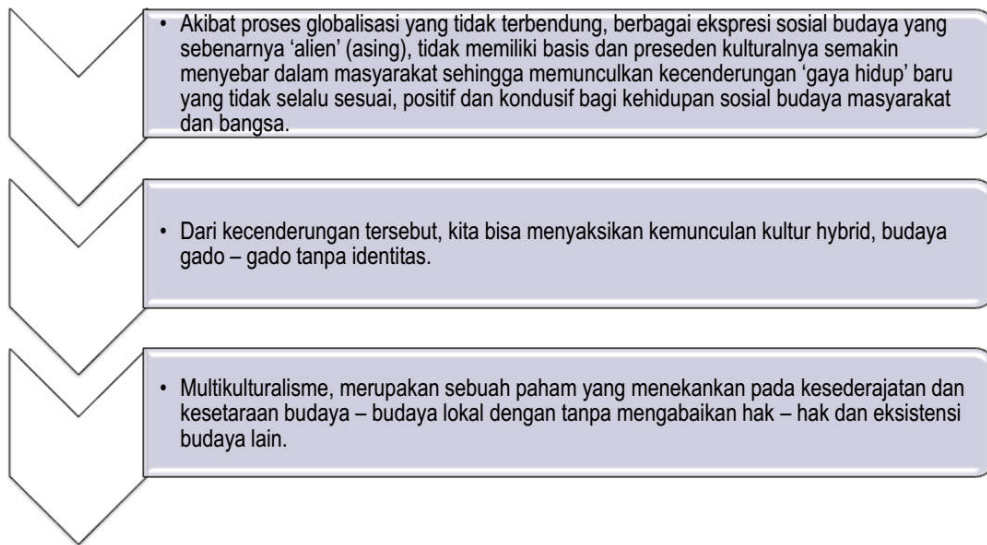
Selain globalisasi terjadi di bidang ekonomi, globalisasi juga terjadi di bidang ideology:



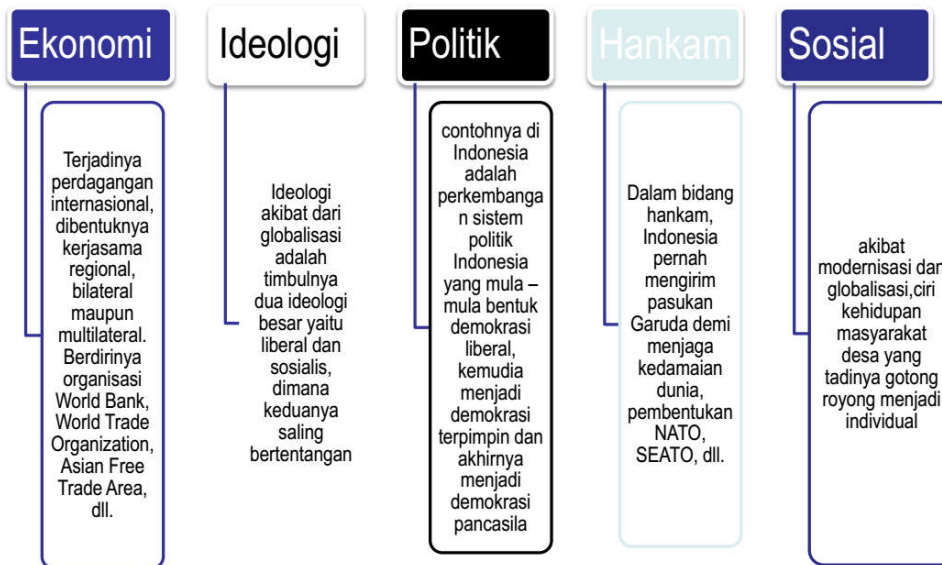
Untuk memahami globalisasi politik dapat diikuti dari bagan berikut:



Mengenai globalisasi di bidang sosial budaya dapat dipahami misalnya dengan melihat bagan berikut:



Untuk memahami apa dampak globalisasi dapat disimak dari gambar berikut:



BAB XII

TERORISME INTERNASIONAL

PENGERTIAN

Untuk mengetahui mengenai pengertian terorisme ada baiknya menengok pengertian secara harfiah dari sejumlah kamus. Oxford Living Dictionaries menyebut terorisme sebagai ¹² The unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians, in the pursuit of political aims. Sementara dictionary.com menyebutkan bahwa terorisme adalah 1. the use of violence and threats to intimidate or coerce, especially for political purposes. 2. the state of fear and submission produced by terrorism or terrorization. 3. a terroristic

Pengertian lainnya dari mediam webster ¹³ terorisme disebut sebagai : the systematic use of terror especially as a means of coercion. Juga dibuat di dictionary.com bahwa terorisme adalah the use of violence, especially murder and bombing, in order to achieve political aims or to force a government to do something.

¹² <https://en.oxforddictionaries.com/definition/terrorism>

¹³ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/terrorism>

Masih dari kamus Bahasa Inggris yakni Collin dictionary terrorisme disebut sebagai ¹⁴ the use of violence, [especially murder](#) and [bombing](#), in order to achieve [political aims](#) or to [force](#) a [government](#) to do something. The unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment there of, in furtherance of political or sosial objectives (Federal Bureau of Investigation)

The calculated use of violence of the threat of violence to inculcate fear, intended to coerce or intimidate governments or societies as to the pursuit of goals that are generally poltical, religious or ideological (United States Department of Defense)

Premeditated, politically motivated violence perpetuated against noncombatant targets by subnational groups of clandestine agents, usually intended to influence an audience (United States Departement of Foreign Affair).

The use or threat, for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause, of action which involves serious violence against any person or property (United Kingdom).

¹⁴ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/terrorism>

Terrorism is a criminal act that influences an audience beyond the immediate victim.¹⁵

Menurut Alex Schmid (Weinberg et al. 2004): “terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-)clandestine individual group or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby— in contrast to assassination—the direct targets of violence are not the main targets. The immediate human victims or violence are generally chosen randomly (target of opportunity) or selectively (representation or symbolic targets) from a target population, and serve as message generator” (cited in Weinberg et al. 2004, p. 3).

Sedangkan Schmid and Jongman (1988, 28) menyebut bahwa Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-)clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby – in contrast to assassination – the direct targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly from a target population, and serve as message generators. Threat- and violence-based communication processes between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to manipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of terror, a target

¹⁵ <http://www.terrorism-research.com/>. Diakses November 2017.

of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought.

Menurut Perwira dan Yanyan (2014) dari pengertian itu terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi yakni motif politik, rencana atau niat dan penggunaan kekerasan.¹⁶ Kegiatan terorisme dapat menjadi berskala internasional apabila:

1. Diarahkan kepada warga asing atau target luar negeri.
2. Dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah atau faksi dari lebih satu negara.
3. Diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan asing.

PBB tahun 1989 yang menyebutkan bahwa terorisme ialah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

TIPE TIPE TERORISME

Menurut Paul Wilkinson, ada beberapa tipe, tujuan dan ciri-ciri dari terorisme yang ia golongan menjadi Terorisme Epifenomenal, Terorisme Revolusioner, Terorisme Subrevolusioner dan Terorisme Represif.¹⁷

1. Terorisme Epifenomenal ialah terorisme tanpa memiliki tujuan khusus, suatu eksekusi dari kekerasan horizontal berskala besar, teror jenis ini berciri-ciri tak terencana rapi.
2. Terorisme Revolusioner memiliki tujuan untuk merevolusi suatu sistem yang ada secara radikal, terorisme jenis ini berciri-ciri memiliki fenomena

¹⁶ Anak Agung Banyu Perwit dan Yanyan Mochamad Yani. 2014. Bandung: Rosda. Hal. 140.

¹⁷ Paul Wilkinson. 2001. *Terrorism versus Democracy: The Liberal State Response*. London and New York: Routledge.

kelompok, memiliki struktur kepemimpinan, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter.

3. Terorisme Subrevolusioner ialah teror yang bermotif politis, menekan pemerintah untuk mengubah pemerintah untuk mengubah hukum atau kebijakan tertentu, perang politis dengan rival atau teror untuk menyingkirkan pejabat tertentu. Ciri- ciri dari terorisme subrevolusioner ialah dilakukan oleh kelompok kecil, sulit untuk diprediksi dan sulit untuk dibedakan dengan tindakan psikopatis.

4. Terorisme Represif ialah aksi teror yang menindas orang lain atau kelompok yang tidak dikehendaki oleh penindas dengan cara likuidasi. Ciri dari teror jenis ini ialah berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, penculikan, penyebaran rasa curiga di masyarakat dan umumnya digunakan sebagai alat penguasa menakuti rakyatnya.

5. Terorisme secara sklatif dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yakni terorisme intranasional, terorisme internasional dan terorisme transnasional. Terorisme Intranasional cakupan wilayahnya terbatas oleh batas wilayah (teritorial) suatu negara, Terorisme Internasional ialah aksi teror yang diarahkan kepada orang asing atau asset asing, diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih dari satu negara dan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan asing dan sedangkan

6. Terorisme Transnasional ialah jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tetanan dunia baru(bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal.

BENTUK-BENTUK TERORISME

Menurut Perwita dan Yani (2014) bentuk terrorisme internasional data berupa 1. State-sponsored terrorism, yaitu tindakan terrorisme yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuannya. Misalnya, Amerika Serikat pernah mengidentifikasi beberapa negara seperti Kuba, Irak, Iran, Libia, Korea Utara dan Suriah. 2. Privately-based terrorism, yaitu tindakan terrorisme yang dilakukan suatu kelompok terrorisme privat seperti Al Qaeda, Jemaah Islamiyah dll.

BAB XIII

TEORI TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pendahuluan

Paradigma Ilmu Hubungan Internasional mengalami transformasi sejalan dengan perkembangan dalam ilmu sosial dan sekaligus perkembangan dalam hubungan internasional. Pada awalnya studi Hubungan Internasional memiliki fokus kepada analisis penyebab perang dan syarat-syarat perdamaian.¹⁸ Fokus itu muncul terkait dengan dua kali Perang Dunia pada abad ke-20. Pengalaman Perang Dunia menjadikan para ilmuwan mengkaji bagaimana agar tidak terjadi lagi perang besar dan bagaimana pula perdamaian bisa tercipta selama mungkin di dunia.

Muncul kemudian berbagai perdebatan paradigma dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional. Istilah paradigma dipopulerkan dan diartikan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions*.¹⁹ Kuhn menyebut paradigma sebagai istilah yang berkaitan dengan “normal science”. Paradigma diartikan Kuhn sebagai *research firmly based upon one or more*

¹⁸ Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith. 2013. *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 1.

¹⁹ Thomas S. Kuhn. 1996. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press. Hal.

*particular past scientific community acknowledges for a time as supplying the foundation for its further practice.*²⁰

Kalau meminjam istilah Kuhn bahwa ilmu berkembang melalui dua fase penting yakni tahap revolusioner yang ditandai dengan fragmentasi teoritis. Pandangan baru muncul dan menantang cara-cara berfikir tradisional. Namun Kuhn berpendapat bahwa ilmu pengetahuan akan berkembang melalui apa yang disebut “normal science” dari satu kerangka teori yang disebut paradigma.²¹

Perkembangan ilmu pengetahuan seperti dimodelkan Kuhn ini disambut oleh disiplin Hubungan Internasional. Ilmu Hubungan Internasional itu sendiri dapat didefinisikan sebagai *study of relationship and interactions between countries, including the activities and policies of national governments, international organizations (IGOs), nongovernmental organizations (NGOs, and multinational corporations (MNCs).*²² Bahkan menurut Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, studi Hubungan Internasional juga fokus kepada faktor-faktor internal sebuah negara seperti kelembagaan, birokrasi pemerintahan koalisi, kelompok-kelompok kepentingan, proses pengambilan keputusan serta ideologi dan persepsi yang dianut oleh para pemimpin.²³

²⁰ Ibid. Hal. 10.

²¹ Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith. Op.cit Hal. 19

²² Robert Jackson and George Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 4.

²³ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. 2012. *International Relations Theory*. Boston: Longman. Hal. 1.

Karena bervariasinya dan kompleksnya apa yang dipelajari terdapat berbagai pandangan dalam mempelajari Ilmu Hubungan Internasional. Selain pendekatan melalui ilmu politik juga dilakukan melalui ekonomi, psikologi, psikologi sosial, sosiologi, antropologi, hukum dan filsafat. Berbagai perspektif terhadap Hubungan Internasional juga muncul menjadi perdebatan antar paradigma.

Empat Paradigma HI

Setidaknya dalam perkembangan Hubungan Internasional terdapat empat perdebatan antar paradigma atau *interparadigm debates*. Makalah ini akan membahas perkembangan yang terjadi dalam paradigma Hubungan Internasional sejak muncul pada tahun 1930-an sampai pada tahun 1990-an. Empat paradigma ini muncul karena cara pandang yang berbeda-beda dan juga karena perkembangan induknya yakni ilmu politik dan ilmu sosial.

Ole Waever menyebutkan sejumlah buku teks Hubungan Internasional memuat tiga paradigma besar yang mendominasi disiplin ini.²⁴ Yang pertama adalah Realisme kemudian yang kedua adalah Pluralism, interdependensi dan *World Society* yang juga dekat dengan sebutan pendekatan Liberal. Sedangkan yang ketiga adalah Marxisme atau yang lebih luas disebut sebagai radikalisme, strukturalisme atau globalisme.

²⁴ Ole Waever. The Rise and Fall of Inter-Paradigm Debate. Dalam Steve Smith, Ken Booth & Marysia Zalewski. 1999. *International Theory: Positivism & Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal 149.

Kemudian pada tahun 1980-an, konstruktivisme semakin menjadi pendekatan yang signifikan dalam Hubungan Internasional.²⁵ Konstruktivisme ini muncul pasca Perang Dingin yang ikut meramaikan perdebatan antar paradigma.²⁶ Paradigma ini muncul sebagai reaksi atas paradigma sebelumnya yang tidak mampu menjelaskan beberapa fenomena penting dalam Hubungan Internasional.

Untuk mengkaji bagaimana paradigma ini berkembang dan aspek-aspek yang menjadi bahan perdebatan maka akan mulai mengulas apa yang disebut Realisme. Paradigma Realisme muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan Idealisme. Paradigma Realis memiliki asumsi (1) pesimis terhadap karakter manusia, (2) keyakinan bahwa hubungan internasional merupakan konflik-konflik dan konflik-konflik diselesaikan melalui perang, (3) tingginya nilai-nilai keamanan nasional dan bertahannya negara, (4) skeptis akan ada kemajuan dalam politik internasional dibandingkan dengan kehidupan politik dalam negeri.²⁷ Pandangan ini dapat dilihat dari para pemikir Realis baik masa lalu maupun masa sekarang.

Kaum Realis menganggap bahwa pandangannya sudah terjadi sejak masa lalu. Kaum Realis mengklaim pandangan nya muncul dari Yunani, Roma, India dan Tiongkok. Sejarah Perang Peloponnesian yang ditulis Thucydides menggambarkan

²⁵ Robert Jackson and George Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 209.

²⁶ Christian Reus-Smit. *Constructivism*. Dalam Scott Burchill etc. 2005. *Theories of International Relations*. New York: Palgrave MacMillan. Hal. 194.

²⁷ Robert Jackson and George Sorensen. *Op.cit.* Hal. 66.

sikap skeptis dalam penggunaan moralitas.²⁸ Argumen Realis lainnya ditemukan juga dalam Arthashastra karya Kautilya di India.

Argumen Realis lainnya ditemukan juga dalam Arthashastra karya Kautilya di India yang beranggapan penting dalam mempertahankan keberadaan negara. Realis mengklaim bahwa Niccolo Machiavelli (1469–1527) merupakan tokoh intelektualnya yang mengatakan setiap tindakan yang dianggap penting untuk hidupnya negara dapat dibenarkan.²⁹ Ada pula nama Thomas Hobbes (1588-1679) dengan pernyataannya mengenai "karakter negara" dimana ketiadaan otoritas menyebabkan individu dapat mengejar keinginannya tanpa hambatan melalui konflik terus menerus. Kemudian muncul pulat tokoh seperti Morgenthau (1965) yang menyatakan bahwa pria dan wanita secara alamiah adalah binatang politik. Mereka dilahirkan untuk mengejar kekuasaan dan menikmati kekuasaan.³⁰ Kalau Paradigma Realis menekankan kepada penggunaan kekuatan dalam mengejar kekuasaan dan perang merupakan solusi konflik, maka Paradigma Liberalis/Pluralis/Interdependence menekankan kepada aspek kerjasama di dalam Hubungan Internasional. Dalam pandangan kaum Liberalis fokus Hubungan Internasional adalah integrasi, interdependensi, teori rejim, teori perdamaian demokratis serta cara-cara dalam *global governance*.³¹

²⁸ Colin Elman. Realist. Dalam Martin Griffiths (ed).2007.*International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction*. London: Routledge. Hal 11.

²⁹ Robert Jackson. Op. cit Hal 79.

³¹ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi.2012. *International Relations Theory*. Boston: Longman. Hal. 129.

Sementara paradigma Marxisme berpendapat bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam Hubungan Internasional. Selain negara terdapat juga actor non negara yang memiliki pengaruh dan kekuatannya melalui pertentangan kelas dalam hubungan ekonomi transnasional.³² Marx memandang ekonomi sebagai tempat eksploitasi manusia dan ketimpangan kelas. Marxis menjadi kerangka bagi studi ekonomi politik internasional. Negara tidaklah otonomi tapi dipicu oleh kepentingan kelas penguasa dan negara kapitalis terutama didorong oleh kepentingan golongan borjuisnya. Ini berarti, pertama, pertarungan antar negara termasuk perang perlu dipandang dalam konteks ekonomi dari kompetisi antara kelas kapitalis di berbagai negara. Kedua, sebagai sistem ekonomi kapitalisme selalu berekspansi, tidak ada kata akhir dalam pencarian pasar baru dan keuntungan lebih banyak.³³ Ekspansi seperti ini membentuk imperialisme dan kolonialisme. Bahkan setelah bebas dari kolonialisme Marxisme memandang berubah bentuk menjadi globalisasi ekonomi yang dipimpin perusahaan transnasional raksasa. Gambaran mengenai empat paradigma dapat dilihat dari tabel berikut:

³² Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 27.

³³ Robert Jackson and George Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 168.

Empat Paradigma Hubungan Internasional

	Realisme	Liberalisme/Pluralisme	Marxisme	Konstruktivisme
Tingkat analisis menurut Rosenau	State-centric	Multi-centric	Global-centric	Multi-centric
Aktor Utama	Negara	Aktor-aktor sub-negara dan non negara	Ekonomi dunia kapitalis dan kelas	Negara dan NGO
Citra	Model bola bilyar	Model jaring laba-laba	Model gurita	Model abstrak
Pandangan atas negara	Aktor tunggal	Terpecah belah menjadi unsur-unsur	Mewakili kepentingan kelas	Salah satu actor, tidak ada aktor dominan
Perilaku dinamis	Negara adalah aktor rasional yang berupaya memaksimalkan kepentingan dirinya atau tujuan nasional dalam politik luar negeri	Pembuatan kebijakan luar negeri dan proses trans-nasional melibatkan konflik, tawar menawar, dan kompromi, tidak selalu mengeluarkan hasil optimal	Fokus atas pola dominan di dalam dan diantara masyarakat	Negara dan NGO membentuk norma, values, identitas

Isu-isu	Keamanan nasional adalah utama	Banyak, setidaknya kesejahteraan	Faktor-faktor ekonomi	Gagasan, norma, values, struktur, identitas
Obyektivitas/Subyektivitas	Kepentingan ada secara obyektif. Negarawan harus menyadarinya dan bertindak untuk itu. Dalam beberapa versi, dunia manipulasi dan intuisi menjadi kehidupan independen	Persepsi dan peran sering berbeda dari realitas. Analisis akademik dapat membantu menemukan kebijakan rasional dan optimal	Struktur mendalam dalam ekonomi sangat stabil dan konsisten. Aktor politik secara sistematis tersesat dalam persepsinya.	Aktor Negara dan NGO akan mendorong terjadinya norma, identitas nilai
Pengulangan/Perubahan	Hukum tidak berubah, hubungan internasional adalah realitas berulang	Perubahan dan kemungkinan kemajuan	Pola stabil dan berlanjut sampai berubah	Evolusi norma, nilai, identitas
Konflik/Kerja sama	Hubungan diantara negara pada dasarnya	Hubungan diantara negara berpotensi kerja sama, aktor non negara sering	Hubungan dalam dan diantara negara bersifat	Negara dan NGO membentuk norma baru

	bersifat konflik/kompetitif	membangkitkan konflik namun membuat citra membingungkan	konflik tetapi perjuangan kelas adalah pola utama	
Waktu	Statis	Evolusioner	Revolusioner	Evolusioner

Sumber: Ole Waever (1999), Paul D'Anieri (2012)

Paradigma Konstruktivis berbeda dengan Realis, Liberalis dan Marxis. Bagi Konstruktivis, perspektif Realis, Liberal dan Marxis sangat menekankan hal-hal materialist. Pandangan Materialis memandang faktor-faktor material seperti uang, wilayah dan senjata sebagai pendorong dalam hubungan internasional. Realis memandang terutama pada distribusi kekuatan militer, Liberalis melibatkan faktor militer dan ekonomi sedangkan Marxis penekanan kepada pusat struktur ekonomi dan distribusi kekuatan ekonomi.

Paradigma Konstruktivis memandang peran gagasan dalam Hubungan Internasional. Walaupun tidak menyangkal pentingnya faktor material seperti uang dan senjata, Konstruktivis berpendapat bahwa pengaruh faktor tersebut tidak ajeg. Sebaliknya pengaruh faktor ini tergantung bagaimana cara berpikir manusia terhadap faktor-faktor itu.³⁴

Perdebatan antar paradigma Hubungan Internasional masih berlangsung karena merupakan bagian dari dinamika disiplin ilmu ini. Bahkan selain paradigma besar Hubungan Internasional berbagai turunan dari paradigma ini bermunculan sebagai upaya menjawab fenomena sosial di tingkat internasional. Kerangka pandangan Hubungan Internasional dalam tingkat di bawah paradigam ini misalnya dengan adanya *English School*, *Feminisme*, *Green Theory* dan *Postcolonialism*.

³⁴ Paul D'Anieri. 2012. *International Politics: Power and Purpose in Global Affairs*. Boston: Wadsworth. Hal 94.

Semuanya ini menjadi bagian perkembangan disiplin ilmu Hubungan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Booth, Ken and Steve Smith. 1995. *International Relations Theory Today*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Brown, Chris. 1992. *International Relations: New Normative Approaches*. London: Haverster Wheatsheaf.
- D' Anieri, Paul. 2012. *International Politics: Power and Purpose in Global Affairs*. Boston: Wadsworth.
- Dunne, Tim, Milja Kurki and Steve Smith. 2013. *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford: Oxford University Press.
- Evans, Graham and Jeffrey Newham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Books.
- Holsti, K.J.1992.*International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Jackson, Robert and George Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Kuhn, Thomas S.1996. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Kusumohamidjoyo, Budiono. 1987. *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: Binacipta.
- Olson, William C. & A.J.R. Groom. 1992. *International Relations Then & Now: Origins and Trends in Interpretation*. London: Routledge.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Reus-Smit, Christian. 2005. Constructivism. Dalam Scott Burchill etc. 2005. *Theories of International Relations*. " New York: Palgrave MacMillan.
- Smith Steve, Ken Booth & Marysia Zalewski. 1999. *International Theory: Positivism & Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press.

Steans, Jill, Lloyd Pettiford, Thomas Diez, Imad El-Anis. 2010. *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes*. Harlow: Longman.

Viotti, Paul R. and Mark V. Kauppi. 2012. *International Relations Theory*. Boston: Longman.

Waever, Ole. 1999. The Rise and Fall of Inter-Paradigm Debate. Dalam Steve Smith, Ken Booth & Marysia Zalewski. *"International Theory: Positivism & Beyond"* Cambridge: Cambridge University Press.

PENGANTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dalam Hubungan Internasional berbagai aktor memiliki peran penting seperti negara. Namun selain negara terdapat aktor non negara termasuk organisasi internasional. Hubungan internasional mempelajari berbagai interaksi negara dan non negara baik dalam keadaan damai dan keadaan perang. Oleh karena itulah maka buku ini membahas berbagai topik utama dalam Ilmu Hubungan Internasional seperti politik luar negeri, perang dan damai, ekonomi politik internasional termasuk isu keamanan global, globalisasi dan terorisme

**ASEP
SETIAWAN**